

# JURNAL KELUARGA

Informasi Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga



## KEMITRAAN

Keberhasilan Program  
Kependudukan, Keluarga Berencana  
dan Pembangunan Keluarga



Badan Kependudukan  
dan Keluarga Berencana Nasional



# HARI KELUARGA NASIONAL

29 Juni 2019

Kalimantan Selatan

*Hari Kita Semua*



www.bkkbn.go.id



@bkkbnofficial



@bkkbnofficial



BKKBN

## JENDELA

2

Wapres Jusuf Kalla:  
Program Kependudukan-KB  
Dibutuhkan dalam Situasi Apapun

Kesiapan BKKBN  
di Era Revolusi Industri 4.0

Bertemunya Sektor Pertanian  
& Kependudukan di Era 4.0

## LAPORAN UTAMA

8

Inilah Kunci Keberhasilan  
Program Kependudukan & KB

Wujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang & Berkualitas  
BKKBN dan TNI BERSINERGI

BKKBN Perkuat Kemitraan  
Dari Mitra Strategis Hingga Kampung KB

Bersinergi di Kampung KB  
Ribuan Unit Rumah Dibangun

Peta Keluarga Dibalik Gerakan Bangun Desa

Rakornis Kemitraan BKKBN,  
Apa Saja Hasilnya?

Bersinergi dengan Seluruh  
Pemangku Kepentingan

## LAPORAN KHUSUS

20

Gubernur Kalimantan Selatan:  
"Mari, Kita Pertajam Lagi  
Program KB"

Kampung KB Hadirkan Program  
"Keroyokan"

## KEPENDUDUKAN & KB

24

Tingkatkan Koordinasi,  
BKKBN Gelar Sosialisasi DAK 2019

Tokoh Agama Kumpul, Bahas Karakter  
Kebangsaan Perspektif Agama

## POTRET

28

## KELUARGA

30

## OPINI

34

## PLESIRAN

38

## KONSULTASI KESEHATAN

40

dr. Irma Ardiana MAPS Menjawab

**Publisher**

Direktorat Advokasi dan KIE

**Penanggungjawab**

Sugiyono

**Redaktur**

Fabiola Tazrina Tazir

Soetriningsih

Samsul

Annisa Halimatusyadiah

Antonius Angkawijaya

**Penyunting/Editor**

Fimela A

Akhmad Gesang Y

Didik Trihantoro

Dwi Nurhayati

Sancoyo Rahardjo

**Desain Grafis**

Elly Manika Maya

Adam Krisna Fahreza

**Sekretariat**

Samyono

Siswanto

Rika Utari

Heru

**Pembuat Artikel**

Irma Ardiana

Nurzainun

Anindita Dyah Sekarpuri

**Fotografer**

Samidi

**Alamat Kantor**

Jl. Permata No. 1

Halim Perdanakusumah

Jakarta Timur

Telp/Fax. (021) 8008261, 8094703

Redaksi menerima tulisan terkait isu Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga. Tulisan diketik 1,5 spasi, maksimal 3 halaman kuarto dan dikirim ke alamat/kantor redaksi atau email redaksi.

email: majalah\_jk@yahoo.com  
ditvokkom@bkkbn.go.id  
ditvokkom@gmail.com

## Kemitraan



**K**emitraan. Singkat saja kata ini, namun memiliki makna begitu dalam bagi jajaran BKKBN. Sejarah mencatat, keberhasilan pelaksanaan program Keluarga Berencana di lapangan, hingga pun Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, berkat satu kata itu.

Pada pemerintahan Presiden RI pertama Soekarno, program KB dimaknai sebagai upaya penyelamatan ibu dari potensi ancaman kematian akibat hamil dan melahirkan. Program jelas ditujukan untuk menjaga kesehatan ibu.

Kala itu, program KB ditangani langsung oleh Departemen Kesehatan di bawah menterinya seorang tentara sekaligus dokter, yaitu dr. Soewardjono Soerjaningrat. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) belumlah lahir.

Baru pada awal 1970, BKKBN dibentuk. Dibentuk khusus mengingat program KB lebih bersifat pemasaran sosial. Memerlukan penanganan khusus dengan mengedepankan komunikasi yang handal.

Program KB menjadi lebih dinamis di bawah kepemimpinan Presiden RI kedua Soeharto. Dan semakin bergemuruh ketika pada 1985 Prof. Dr. Haryono Suyono diangkat sebagai Kepala BKKBN menggantikan dr. Soewardjono.

Mulailah saat itu program KB masif dibumikan ke tengah masyarakat melalui berbagai bentuk sosialisasi dan pendekatan. Salah satu yang mengemuka adalah dengan membangun kemitraan.

Saking giatnya, sampai-sampai BKKBN mendapat "cap" sebagai lembaga yang kerap "lompat pagar" dalam menggeber programnya. Namun, sebagai lembaga koordinasi, tampaknya hal itu sah-sah saja dilakukan dalam usaha membangun kemitraan dengan banyak sektor.

Apalagi presiden Soeharto menaruh harapan besar. Sebuah harapan akan keberhasilan program agar masyarakat bisa secepatnya bangkit dalam kesejahteraan.

Nyatanya, program mendulang sukses. Banyak penghargaan internasional berhasil didulang. *Total Fertility Rate* (TFR) berhasil ditekan dari lima menjadi mendekati dua digit saat ini. Laju pertumbuhan penduduk dikendalikan menjadi 1,49 persen.

Bonus demografi juga merupakan hasil kontribusi program KB yang terwujud karena kemitraan.

Semua capaian itu tentu kuncinya ada di kemitraan. Tanpa jaringan kemitraan, program KB tak ada artinya lagi. Maka, kini pun BKKBN tetap mempertahankan, bahkan mencoba mempertajam program kemitraan dengan banyak pihak. Mulai dari instansi pemerintah hingga menyentuh komunitas dalam masyarakat.

Upaya memperluas jaringan kemitraan dilakukan dengan satu harapan, program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga akan kembali mempunyai kekuatan di akar rumput.

Sugiyono



Wapres Jusuf Kalla:

# Program Kependudukan-KB Dibutuhkan dalam Situasi Apapun

Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan, program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) tetap dibutuhkan bangsa Indonesia dalam situasi apapun. Termasuk di era Revolusi Industri 4.0 saat ini.

Menurut Jusuf Kalla, BKKBN sebagai institusi yang menangani kependudukan dan keluarga berencana dengan pendekatan siklus kehidupan keluarga –sejak masa janin dalam kandungan hingga masa lanjut usia– harus dapat menjawab tantangan untuk berkontribusi memanfaatkan era Revolusi Industri 4.0.

“Hal ini karena faktor pendidikan dan nilai karakter bangsa sangat dipengaruhi dan dimulai dari peran individu di dalam keluarga.”

Penegasan itu disampaikan Wapres Jusuf Kalla saat membuka Rapat Kerja Nasional Program KKBPK tahun 2019 dan Simposium Nasional Memasuki Era Revolusi Industri 4.0, di Istana Wakil Presiden Jakarta, menjelang akhir Februari lalu.

Menteri Kesehatan RI, Nila Djuwita F. Moeloek; Prof Haryono Suyono; para pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama BKKBN; Kepala Dinas OPD KKBPK Provinsi se-Indonesia, dan akademisi menghadiri acara tersebut.

Wapres Jusuf Kalla mengatakan tantangan program KKBPK dalam Revolusi Industri 4.0 semakin berat, di tengah upaya BKKBN menurunkan angka kelahiran, peningkatan kesertaan



Wapres Jusuf Kalla membuka Rakernas dan Simposium di Istana Wapres, didampingi Menkes Nila Moeloek dan Sekretaris Utama BKKBN, Nofrijal. (Foto: ASDEP KIP Setwapres)

ber-KB metode kontrasepsi jangka panjang, penurunan tingkat putus pakai kontrasepsi, peningkatan pemahaman masyarakat tentang isu kependudukan, serta menurunkan jumlah keluarga pra-sejahtera.

Untuk menjawab tantangan tersebut, BKKBN tidak mungkin melakukan sendiri. Untuk itu, Wapres Jusuf Kalla mendorong agar BKKBN melakukan penguatan sinergitas, komitmen, dan kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan mitra kerja di seluruh tingkatan wilayah.

Di bagian lain sambutannya, Wakil Presiden mengatakan, saat ini pembahasan KB tak lagi sebatas pembatasan kelahiran, tetapi juga tentang kesejahteraan keluarga.

Dulu, program KB dijalankan untuk mengurangi kelahiran lantaran ada kekhawatiran ledakan penduduk yang tidak terkontrol. Dewasa ini, KB juga membahas bagaimana agar keluarga menjadi sejahtera.

“Program KB dibutuhkan dalam situasi apapun. Dan masih sangat diperlukan dalam era Revolusi Industri 4.0,” tandas Wapres.

## SASARAN PROGRAM

Mengenai sasaran program. Sekretaris Utama BKKBN, Nofrijal, menjelaskan yang harus dicapai BKKBN dalam Renstra 2015 – 2019 antara lain menurunkan rata-rata laju pertumbuhan penduduk dari 1,38% per tahun pada 2015 menjadi 1,21% per tahun pada 2019.

Berikutnya, menurunkan *Total Fertility Rate* (TFR) per perempuan usia reproduksi dari 2,37 tahun 2015 menjadi 2,28 tahun 2019; meningkatkan *Contraceptive Prevalence Rate* (CPR) semua metode dari 65,2% menjadi 66%; menurunkan kebutuhan ber KB tidak terlayani (*unmet need*) dari 10,6% menjadi 9,91%.

Juga, menurunkan *Age Specific Fertility Rate* (ASFR) dari 46 menjadi 38 per 1000 perempuan kelompok Umur 15 – 19 tahun; menurunkan persentase kehamilan yang tidak diinginkan pada Wanita Usia Subur dari 7,1% menjadi 6,6%.

Untuk mencapainya, BKKBN hendaknya berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan, terutama dalam menyusun, mengembangkan dan menindaklanjuti



Foto bersama Wapres Jusuf Kalla, Menkes Nila Moeloek, Prof. Dr. Haryono Suyono dan pejabat BKKBN serta tamu undangan usai pembukaan Rakernas dan Simposium di Istana Wakil Presiden. (Foto: ASDEP KIP Setwapres)



Wapres Jusuf Kalla dan Sestama BKKBN saat memberikan sambutan. (Foto: ASDEP KIP Setwapres)

## Menghadirkan Pembicara Berkelas

Tahun ini, Rapat Kerja Nasional program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga diawali dengan simposium. Luar biasanya, simposium yang digelar menjelang akhir Februari lalu ini dihadiri Ketua Forum Rektor Indonesia yang

berbagai kebijakan dan strategi program KKBPK.

Hasilnya akan dirasakan masyarakat perkotaan maupun pedesaan. Termasuk masyarakat kurang mampu di wilayah padat penduduk, wilayah nelayan, daerah terpencil, tertinggal, perbatasan dan beberapa lainnya.

Adapun tema Rakernas: "Meningkatkan Sinergitas Implementasi Program Kerja Pusat dan Daerah dalam Mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang dan Keluarga Berkualitas". Sementara tema simposium: "Tantangan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga pada Era Revolusi Industri 4.0". (san)

membawahi sekitar seribu lebih perguruan tinggi negeri dan swasta.

Sejumlah pembicara berkelas ikut dihadirkan. Sebagai narasumber adalah Ketua Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi, ST, MI, Pol; Deputy Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan BKKBN, Prof. drh. Muhammad Rizal Martua Damanik, M.RepSc, PhD.

Ikut berbicara Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset dan Teknologi, Dr. Muhammad Dimiyati; Deputy Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas, Dr. Ir. Arifin Rudiyanto, MSc.

Berikutnya, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Didik Suhardi, Ph.D; Pakar Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga Surabaya, Prof. Dr. Chairul Anwar Nidom.

Juga tampil, Rektor Institut Pertanian Bogor, Dr. Arif Satria SP, MSi; Rektor Universitas Brawijaya, Malang, Prof. Dr. Ir. Nuhri Hanani AR, MS; Rektor Universitas Sahid Jakarta, Prof. Dr. Ir. Hardinsyah, MS; dan Psikolog, Elly Risman Musa.

Adapun pembahas pada simposium ini adalah staf ahli bidang Kependudukan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Dr. Sonny Harry Budiutomo; Rektor Universitas Hasanuddin, Makassar, Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu M.A.

Ada juga Ketua Majelis Kolegium Kesehatan Masyarakat Indonesia, Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, dr. Kemal N Siregar, SKM, MA, Ph.D; dan Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Lely Pelitasari Soebekty SP, ME.

"Simposium nasional ini diharapkan menghasilkan strategi yang inovatif mengenai program KKBPK di era Revolusi Industri 4.0. Termasuk penguatan program KKBPK dengan menekankan pada aspek inovasi dan kreativitas program agar output dicapai secara produktif," ujar Prof Rizal Damanik, Deputy Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan BKKBN. (san)



Wapres Jusuf Kalla (kedua dari kanan) didampingi Menkes Nila Moeloek berbincang dengan Prof. Dr. Haryono Suyono dan pejabat BKKBN. (Foto: ASDEP KIP Setwapres)



# Kesiapan BKKBN di Era Revolusi Industri 4.0

**R**evolusi Industri pertama terjadi hampir 3 abad silam. Kini, kita telah memasuki Revolusi Industri keempat (4.0) era kecerdasan buatan atau *artificial intelligence* (AI). Sayangnya, kesiapan terhadap Revolusi Industri 4.0 tidak terjadi serentak di seluruh dunia. Bagaimana kesiapan Indonesia?

ABB dan *The Economist Intelligence Unit* (2018) telah menyurvei 25 negara terkait kesiapan negara tersebut menghadapi era otomatisasi berkat semakin canggih robot

dan AI. Sayangnya, kesiapan Indonesia masih berada di ranking 25. Hal ini tentu bukan prestasi menggembirakan. (*Kompas*, 25/10/2018).

Dalam berbagai gelar seminar, para penyaji materi masih ragu dengan persiapan Indonesia, meskipun mereka tetap optimistis.

Korea Selatan merupakan peringkat pertama. Bukan hal mengejutkan mengingat pemerintah Korea Selatan telah menyiapkan penduduknya memasuki era AI. Salah satunya dengan pembelajaran *coding* sejak tingkat pendidikan SD.

Revolusi Industri akan mengubah segalanya menjadi lebih mudah dan efisien.

## PANDUAN PENGASUHAN ANAK

BKKBN, dalam hal ini Direktorat Bina Balita dan Anak pun tak mau ketinggalan kereta. Direktorat ini sedang mempersiapkan semacam panduan pengasuhan anak. Antara lain bagaimana menyikapi deru Revolusi Industri 4.0 bekerjasama dengan tokoh-tokoh agama melalui Forum Antar Umat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan (Fapsedu). Bahkan juga diharapkan melongok ke Revolusi Industri 5.0 yang sudah merasuk di sejumlah negara maju.

Dalam simposium Tantangan Program KKBP pada Era Revolusi Industri 4.0 akhir Februari lalu, Deputi Bidang Pelatihan Penelitian dan Pengembangan BKKBN Prof. Muhammad Rizal Martua Damanik, PhD pun telah mempersiapkan kontribusi, dengan menyikapi Karakteristik Revolusi Industri 4.0.

Prof. Damanik antara lain melihat dari proses digitalisasi, yang di antaranya terjadi optimisasi dan kustomisasi produksi, *auto pilot* dan adaptasi, *human machine interaction*, *value added services and businesses* serta *automatic data exchange and communication*. Termasuk penggunaan teknologi *internet value added* dan manajemen pengetahuan.

Dia pun menyinggung dampak dunia digital dan Revolusi Industri 4.0 berupa Era Baru Industrialisasi Digital.

Nah, adakah risikonya. Memang ada ancaman menghadang. Misalnya, secara global era digitalisasi menghilangkan sekitar 1-1,5 miliar pekerjaan sepanjang 2015-2025 karena digantikannya posisi manusia dengan mesin otomatis.

Diperkirakan di masa yang akan datang, 65% murid sekolah dasar di dunia akan bekerja pada pekerjaan yang belum pernah ada di dunia hari ini. Kedatangan berbagai 'hantu' tersebut bukannya tidak memberikan peluang.

Menurut Prof. Damanik, era digitalisasi berpotensi memberikan peningkatan *net* tenaga kerja hingga 2.1 juta pekerjaan baru pada 2025. Terdapat potensi pengurangan emisi karbon kira-kira 26 miliar metrik ton dari tiga industri: elektronik (15,8 miliar), logistik (9,9 miliar) dan otomotif (540 miliar) dari pada 2015-2025.

Lantas bagaimana menyikapi ram-bahan dunia digital? "Saat ini kenyataan di depan mata, beberapa jenis model bisnis dan pekerjaan di Indonesia, sudah terkena dampak dari arus era digitalisasi. Toko konvensional sudah mulai tergantikan dengan model bisnis '*market place*'. Taksi atau ojek tradisional, posisinya sudah mulai



Deputi Bidang Pelatihan Penelitian dan Pengembangan BKKBN  
Prof. Muhammad Rizal Martua Damanik, PhD. (Foto: Humas BKKBN)



Sejumlah pembicara bersama pejabat BKKBN pada Simposium Nasional Tantangan Program KKBPK pada era Revolusi Industri 4.0.(Foto: Humas BKKBN)

tergeserkan dengan moda-moda berbasis online, katanya.

Tuntutan 'skill' di industri masa depan dan tantangannya, adalah 'complex problem solving', berupa kemampuan untuk memecahkan masalah yang asing dan belum diketahui solusinya di dalam dunia nyata. Untuk skill diperlukan kemampuan untuk melakukan koordinasi, negosiasi, persuasi, mentoring, kepekaan dalam memberikan bantuan hingga 'emotional intelligence'.

'Process skill', kemampuan terdiri dari: 'active listening', 'logical thinking', dan 'monitoring self and the others'. 'System skill', yakni kemampuan untuk dapat melakukan 'judgement' dan keputusan dengan pertimbangan 'cost-benefit' serta kemampuan untuk mengetahui bagaimana sebuah sistem dibuat dan dijalankan.

Dalam hal 'cognitive abilities', skill terdiri dari antara lain 'cognitive flexibility', 'creativity', 'logical reasoning', 'problem sensitivity', 'mathematical reasoning', dan 'visualization'.

### STRATEGI OPERASIONAL

Balitbang KKBPK memasuki Era Revolusi Industri 4.0 telah mempersiapkan strategi operasional. Antara lain re-orientasi kurikulum dengan literasi baru (data, teknologi, humanities) dikembangkan dan diajarkan, model pelatihan pengembangan kepemimpinan dan bekerja dalam tim agar terus dikembangkan serta model 'entrepreneurship' dan 'internship'.

Unit Khusus 'Life Long Learning', ada unit materi mendalami life-long learning, 'hybrid/blended on-line learning' dengan menerapkan sistem pengajaran hybrid/

blended online learning (satu cara ajar, multi lokasi/kementerian atau lembaga.

Selain itu, 'dynamic capacity building', kapasitas bagi peneliti BKKBN dalam menelaah/merespon dinamika perubahan lingkungan strategis yang cepat dan menentukan solusi strategis.

Bagaimana Balitbang KKBPK merespon era Revolusi Industri 4.0? Prof. Damanik mengatakan perlu komitmen peningkatan investasi SDM program dikaitkan digital skills. Selalu mencoba dan menerapkan prototype penelitian teknologi terbaru, Learn by doing!

Selain juga pengembangan model kolaborasi baru dalam peningkatan program dikaitkan digital skill, dilakukannya manajemen kolaborasi antara dunia usaha, akademik, dan elemen masyarakat untuk mengidentifikasi permintaan dan ketersediaan skill era digital bagi kebutuhan program. Dan menyusun materi kurikulum latbang yang telah memasukan

materi terkait human-digital skill.

### MOTOR UTAMA

Guna percepatan menggapai era 4.0, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kemenristekdikti, yang tampil dalam simposium itu menjadikan riset sebagai motor utama penghasil invensi dan inovasi, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan daya saing bangsa.

Menurut Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Muhammad Dimiyati, apa yang dilakukan pihaknya semata ditujukan untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang inovatif, berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, menciptakan keunggulan kompetitif bangsa secara global dengan berbasis riset.

Dalam kaitan ini, BKKBN sudah pasti menggandeng Kemenristekdikti, sebagai salah satu wadah para akademisi untuk mengembangkan program KKBPK. (her/sara)



Suasana Simposium Nasional Tantangan Program KKBPK pada Era Revolusi Industri 4.0. (Foto: Humas BKKBN)





Rektor Universitas Brawijaya Prof. Dr. Nuhril Hanani (kedua dari kiri) didampingi Prof. Dr. Haryono Suyono dan sejumlah pejabat BKKBN. (Foto: Humas BKKBN)

## Bertemuinya Sektor Pertanian & Kependudukan di Era 4.0

**R**evolusi Industri 4.0 akan berdampak luas, pun ke sektor pertanian. Perubahan itu antara lain meliputi 'demand', sumber daya lahan dan SDM, teknologi, perubahan iklim dan isu lingkungan. Bagaimana dengan sektor kependudukan?

Perubahan *demand* pertanian, misalnya, meliputi pangan, pakan, farmasi, lingkungan, kosmetika, estetika, bahan baku industri dan energi. Juga akan terjadi sistem pertanian hemat lahan dan tenaga kerja, karena lahan dan tenaga kerja terbatas dan mahal.

Hal itu dikemukakan Rektor Universitas Brawijaya Prof. Dr. Nuhril Hanani dalam Simposium Nasional yang digelar BKKBN sehari menjelang kegiatan Rakernas BKKBN, di Jakarta, akhir Februari.

Menurut Prof. Nuhril, di era Revolusi Industri 4.0 akan terjadi peningkatan penduduk di perkotaan. Ini berpotensi terjadinya konsentrasi ekonomi di perkotaan dan semakin tidak berdayanya perdesaan.

"Terbangunnya sektor pertanian di era 4.0 juga berpotensi mencegah urbanisasi yang memperparah ketimpangan kegiatan

ekonomi desa dan kota," ujarnya.

Lantas bagaimana tantangan pembangunan pertanian di Era Industri 4.0 dalam pembangunan kependudukan?

Menurut Prof. Nuhril, Revolusi Industri 4.0 membuka peluang efisiensi atas produksi sampai pemasaran, *opportunity cost* lahan dikuasai petani akan turun. "Jika petani tidak beradaptasi, fungsi atau kepemilikan lahan semakin kuat," ujar Prof. Nuhril.

"Sebanyak 30 persen tenaga kerja masih di sektor pertanian perlu melakukan transformasi dan beradaptasi dengan



karakter Industri 4.0,” tutur Rektor Universitas Brawijaya, Malang ini.

Integrasi pertanian dengan pasarnya, integrasi antar pasar produk pertanian, hilirisasi produk untuk nilai tambah *‘driven by demand’*, dan meningkatnya *‘entrepreneurship’* tenaga kerja pertanian, menurut Prof. Nuhri, menjadi syarat utama (*necessary conditions*) menuju pertanian maju dan pembangunan SDM pertanian.

Selanjutnya agro-industri yang sekarang masih belum optimal, menjadi kunci dan jembatan transformasi menuju pertanian maju di era Industri 4.0. “Pengembangan wirausaha muda

untuk menggerakkan nilai tambah atau agroindustri. Tepatnya menggeser sektor produksi primer ke sektor lainnya seperti pengolahan dan jasa.

“Penduduk usia muda akan lebih tertarik kembali dengan pertanian, karena munculnya wirausaha muda pertanian yang mampu menjadi pelopor pembaharuan pertanian menuju produktivitas, efisiensi, nilai tambah tinggi di sektor pertanian,” ujarnya.

Selain itu, penduduk di perdesaan akan meningkat *income* perkapita sehingga terjadi gerakan pengentasan kemiskinan di desa. Dampaknya, mencegah urbanisasi,

anjurkan agar lahan pertanian dikembangkan di luar Jawa melalui pola transmigrasi. Model ini akan membawa dampak pengurangan urbanisasi dan kemiskinan di Jawa. (her/san)



**Munculnya wirausaha muda pertanian yang mampu menjadi pelopor pembaharuan pertanian menuju produktivitas, efisiensi, nilai tambah tinggi di sektor pertanian**



Di era Industri 4.0 sektor pertanian diharapkan bisa dikelola para wirausaha muda dengan menerapkan teknologi lebih modern. (Foto: repro)

pertanian adalah tanggung jawab bersama pemerintah, perguruan tinggi, dan seluruh masyarakat,” ujarnya.

Dikemukakan, sumber daya pertanian yang masih potensial di luar Jawa dapat lebih dioptimalkan dengan pemerataan SDM berkualitas di bidang pertanian di seluruh wilayah Indonesia.

#### IMPLIKASI BAGI KEPENDUDUKAN

Adapun implikasi penguatan pembangunan pertanian ke depan bagi sektor kependudukan, adalah surplusnya tenaga kerja pertanian dapat diarahkan

dan mereduksi disparitas standar hidup desa dan kota.

“Pertanian saat ini masih diusahakan oleh kaum tua dengan pendidikan rendah dan teknologi sederhana. Pada era Industri 4.0 perlu diarahkan pada pengembangan wirausaha muda pertanian dengan teknologi yang lebih modern,” katanya.

Dia juga meng-



Prof. Dr. Nuhri Hanani. (Foto: repro)



TNI bersama BKKBN menyelenggarakan pencanangan Bakti Sosial TNI Manunggal-KB Kesehatan di Kota Pariaman. (Foto: MPC BKKBN)

## Wujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang & Berkualitas

# BKKBN dan TNI BERSINERGI

**T**NI bekerja sama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyelenggarakan Pencanangan Bakti Sosial TNI Manunggal KB-Kesehatan tahun 2019 Tingkat Nasional bertempat di Pantai Kata, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, Senin (04/03/2019).

Kegiatan ini dicanangkan oleh Asisten Teritorial

(Aster) Panglima TNI, Mayjen TNI George Elnadus Supit, S.Sos. yang mewakili Panglima TNI. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Utama BKKBN, H. Nofrijal SP, MA., Gubernur Sumatera Barat, Walikota Pariaman, Bupati Padang Pariaman, Danrem seluruh Indonesia, Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama BKKBN dan Kementerian terkait.

Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P, dalam sambutan tertulis yang dibacakan Aster Panglima TNI menyampaikan bahwa pencanangan Bakti Sosial TNI KB Kesehatan Tingkat Nasional Tahun 2019 di Kota Pariaman merupakan salah satu bentuk kontribusi BKKBN dan TNI serta mitra kerja BKKBN lainnya untuk membangun kependudukan Indonesia agar tumbuh seimbang dengan daya dukung yang tersedia. Sehingga bangsa Indonesia secara keseluruhan akan menjadi bangsa yang kuat, sejahtera adil dan makmur.

Keberhasilan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBP), menurut Panglima TNI, akan menghasilkan sumber daya manusia yang tangguh dan meningkatkan derajat

ketahanan nasional.

Keberhasilan program juga mampu memberikan jaminan terhadap kesinambungan pembangunan nasional. "Semua itu pada akhirnya akan mampu secara signifikan meningkatkan kesejahteraan rakyat," terang Panglima TNI.

Panglima TNI mengatakan saat ini para Babinsa sudah diberi kemampuan oleh BKKBN sebagai motivator. Sehingga bentuk bantuan yang diberikan menjadi lebih berkualitas bekerja sama dengan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB). "Para PLKB dan Babinsa harus secara terus menerus diberikan kemampuan dalam hal penggiatan program Keluarga Berencana. Ini agar mereka mampu mengembangkan dan melakukan pendekatan kepada masyarakat di lapangan," ujarnya

"Saya sangat berharap melalui kegiatan kerja sama seperti ini akan menghasilkan formula yang dapat mendorong terwujudnya ketahanan keluarga sebagai kekuatan mendasar dalam rangka mewujudkan ketahanan nasional," kata Panglima TNI.

### MITRA KERJA POTENSIAL

Sekretaris Utama BKKBN, Nofrijal menambahkan bahwa TNI merupakan mitra kerja yang sangat potensial dalam mempercepat pencapaian keberhasilan program KB. Tujuannya, mengendalikan angka kelahiran di Indonesia.

"Sejarah mencatat, kerjasama antara BKKBN dengan TNI berhasil menekan



Aster Panglima TNI,  
Mayjen TNI George  
Elnadus Supit, S.Sos

Sestama BKKBN,  
H. Nofrijal SP, MA

Gubernur Sumatera Barat,  
Irwan Prayitno

Walikota Pariaman,  
Genius Umar

(Foto: MPC BKKBN)





Suasana pembukaan Bakti Sosial TNI Manunggal-KB Kesehatan di Kota Pariaman. (Foto: MPC BKKBN)

angka kelahiran dari 5,6 pada awal tahun 1970-an menjadi 2,6 pada awal tahun 2000-an dan 2017 menjadi 2,4," ujar Nofrijal.

Capaian ini berdampak pada peningkatan pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan dan perekonomian. Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera juga melembaga dengan baik dan dapat mencegah kelahiran yang tidak diinginkan sebanyak 80-100 juta jiwa.

"Kami berharap kerja sama ini dapat terus kuat terjalin dan ditingkatkan," terang Nofrijal.

TNI telah membantu BKKBN dengan melibatkan Babinsa – dan PLKB yang telah alih kelola sebagai tenaga pusat– untuk menjadi tenaga penggerak dan motivator di lapangan.

"Adanya pemaduan dan integrasi kegiatan yang sinergis dengan TNI dan lintas sektor lain, baik lembaga eksekutif dan legislatif daerah, LSM, sektor swasta serta tokoh agama dan masyarakat, dapat memperkuat kembali program KKBPK di lapangan", lanjutnya.

Pencanangan bakti sosial ini merupakan momentum penting yang diharapkan dapat berkontribusi nyata dan meningkatkan kesertaan masyarakat dalam program KKBPK.

Kegiatan bakti sosial ini dipastikan dapat menjangkau sasaran sampai daerah terpencil dan tertinggal untuk menjaga kualitas pelayanan dan kelangsungan ber-KB. Khususnya di Kampung KB.

"Ini sejalan dengan arahan Presiden, BKKBN mendapat amanat untuk membentuk Kampung KB, sebagai poros pembangunan di tingkat desa. Dilakukan dengan memprioritaskan sinergitas

pembangunan fisik dan non fisik dan program prioritas pemerintah lainnya."

"Juga dilanjutkan dengan memadukan program dan kegiatan antar kementerian dan lembaga. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup



Sestama BKKBN tengah mendapat pelayanan kesehatan. (Foto: MPC BKKBN)

masyarakat di daerah tersebut agar dapat merasakan manfaat pembangunan," kata Nofrijal.

Nofrijal berharap pelaksanaan pembentukan Kampung KB dapat terus terselenggara dengan baik dan berkelanjutan. Penguatan dan percepatan sasaran program KKBPK dapat tercapai sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat dari pembangunan guna mewujudkan kondisi penduduk tumbuh seimbang dan pembangunan manusia yang berkualitas.



Penyerahan bingkisan dilakukan masing-masing perwakilan kepada kader Keluarga Berencana. (Foto: MPC BKKBN)

"Pengarapan program pembangunan berbagai sektor terkait di Kampung KB ini diharapkan dapat dilakukan oleh seluruh masyarakat dengan fasilitasi Kepala Desa, Ketua RW, Ketua RT, PKB/PLKB, PKK, institusi masyarakat pedesaan (IMP), Babinsa dan tokoh masyarakat, kader, serta lintas sektor terkait," harapnya.

Dalam kegiatan ini juga dilaksanakan Pelayanan KB Gratis, Penyerahan Bantuan berupa ATTG bagi kelompok UPPKS, Penyerahan BKB KIT, GenRe Kit dan Kartu Indonesia Sehat (KIS), serta pameran gelar dagang.

(Humas BKKBN/Icha/sara)



TNI bersama BKKBN dan Pemerintah Daerah Sumatera Barat menyelenggarakan pencanangan Bakti Sosial TNI Manunggal-KB Kesehatan di Kota Pariaman. (Foto: MPC BKKBN)

## BKKBN Perkuat Kemitraan Dari Mitra Strategis Hingga Kampung KB

**B**adan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) terus memperkuat kemitraan dengan sejumlah pihak. Kemitraan menjadi potensi besar dalam meningkatkan capaian program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBP).

Hingga saat ini BKKBN telah mengembangkan kerjasama setidaknya dengan 115 mitra.

“Walaupun dalam implementasinya

hanya sekitar 60 persen yang aktif, itu artinya masih ada mitra kerja yang harus ditingkatkan peran sertanya sesuai dengan kesepakatan bersama,” ujar Plt. Deputi Advokasi, Penggerakan dan Informasi BKKBN, M. Yani, di Jakarta, belum lama ini.

Menurut Yani, selain Rapat Kerja Nasional (Rakernas), BKKBN juga menyelenggarakan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Kemitraan Program KKBP. Rakornis diadakan satu tahun sekali.

“Rakornis tersebut diharapkan dapat

menyegarkan kembali poin-poin kerjasama yang telah disepakati antara *stakeholder* dan mitra kerja dan merancang kembali program yang dapat dilakukan bersama,” katanya.

Salah satu mitra kerja abadi BKKBN adalah TNI. Sejak awal program KB hingga saat ini kemitraan tersebut tidak pernah putus sekalipun. Melalui kegiatan pelayanan Bakti Sosial TNI Manunggal -Keluarga Berencana Kesehatan (TMKK), harmonisasi kemitraan itu terus dibangun- segarkan.



TMKK bertujuan meningkatkan pelayanan KB dan kesehatan masyarakat serta mendukung terwujudnya keluarga berkualitas. Juga bertujuan menyebarluaskan informasi kepada masyarakat akan pentingnya program KB dan kesehatan.

Selain juga membantu pemerintah daerah mengatasi permasalahan kependudukan dalam rangka mengendalikan laju pertumbuhan penduduk.

### MITRA STRATEGIS

Sejarah telah mencatat TNI merupakan mitra kerja yang sangat strategis dan potensial dalam memberikan kontribusi keberhasilan program penurunan fertilitas pada khususnya dan program KKBPK pada umumnya.

TNI mempunyai perspektif bahwa domain perkembangan kependudukan dilakukan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara kuantitas dan kualitas serta persebaran penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan. Dilakukan guna menunjang pelaksanaan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Masalah kependudukan adalah masalah negara. Masalah ini tidak dapat berdiri sendiri. Penanganannya memerlukan interkoneksi antar institusi, termasuk TNI. Dan TNI menyadari bahwa persoalan kependudukan akan berdampak negatif terhadap upaya-upaya pembangunan lainnya.

Kerjasama BKKBN dengan TNI dikembangkan dalam pelayanan KB dan kesehatan reproduksi. Antara lain melalui pelatihan bagi para tenaga medis yang berada di lingkungan fasilitas pelayanan kesehatan TNI, KIE serta penggarapan KB di wilayah legok, tertinggal dan wilayah khusus dengan melibatkan Bintara Pembina Desa (Babinsa) TNI-AD.

Hal ini dilakukan untuk menjaga kelangsungan dan kualitas kesertaan ber-KB dan mendorong pemakaian alat kontrasepsi jangka panjang.

Adapun prioritas garapan BKKBN bersama mitra kerja sesuai Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019 adalah memfasilitasi pembinaan kesertaan ber-KB di 60% kabupaten *Galciltas* (tertinggal, terpencil, perbatasan) dan 65% wilayah

kota. Juga meningkatkan persentase kesertaan KB Pria menjadi 4,3%.

Ke depan, melihat pergerakan dan tantangan program, menurut Yani, peran TNI akan diperluas dan diperkuat. Apalagi dengan adanya Kampung KB. Kampung bermitranya banyak pemangku kepentingan demi memberdayakan warga

### KAMPUNG KB

Berdasarkan data BKKBN, sejak awal penancangan di Cirebon, Jawa Barat oleh Presiden Joko Widodo tiga tahun lalu sampai saat ini, Kampung KB telah dicanangkan di 7.657 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.

Menurut Sigit Priohutomo, kala itu, sebagian Kampung KB yang baru berisi dicanangkan hanya berisi kegiatan layanan KB, kesehatan dan PKK. Program dari sektor lain yang mengarah pada pembangunan sumber daya manusia belum banyak

terintegrasi di dalamnya.

Karena itulah peningkatan kualitas Kampung KB yang menjadi salah satu prioritas BKKBN di 2019 membutuhkan kemitraan yang solid. Dukungan komitmen yang bersinergi dan terpadu dari para pemangku kepentingan dan mitra kerja, diperlukan secara operasional mulai dari tingkat pusat hingga lini lapangan.

Sigit pernah mengatakan, "Kampung KB belum mencapai sasaran kalau program di dalamnya bukan kerja sama lintas sektor. Kita harapkan Kampung KB bukan hanya seremonial, tapi banyak sektor terlibat di dalamnya baik pemerintah, swasta dan masyarakat sendiri."

Kampung KB menjadi miniatur kafetaria yang melayani kebutuhan masyarakat dalam membangun dan merencanakan keluarga. Dan kemitraan akan berada dibalik keberhasilan itu kelak.

(san)



TNI bersama BKKBN melayani kesehatan masyarakat. (Foto:MPG/BKKBN)

# Bersinergi di Kampung KB Ribuan Unit Rumah Dibangun

**K**ampung KB menjadi ajang sinergitas pembangunan manusia dan infrastruktur antar banyak pihak. Satu di antaranya berupa pemberian bantuan stimulan pembangunan ratusan unit perumahan di Kampung KB.

Kalimantan Barat (Kalbar) merupakan satu dari sedikit provinsi yang semakin gencar mengintervensi Kampung KB agar infrastruktur dan masyarakatnya terentaskan dari ketertinggalan.

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kalimantan Barat, contohnya. Intervensi diwujudkan di antaranya melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Data Dinas PUPR Kalimantan Barat menunjukkan sedikitnya 512 unit rumah di Kampung KB disentuh program BSPS pada 2018. Terserak di berbagai wilayah, menyentuh ribuan warga Kampung KB.

“Bantuan melalui program stimulan ini, yakni pembangunan rumah yang dibangun secara swadaya dengan menjaga



BKKBN bekerjasama dengan Kementerian PUPR menggelontorkan bantuan stimulan untuk pembangunan rumah di Kampung KB wilayah Kalimantan Barat. (Foto: PUPR)

kualitas rumah yang dibangun,” ujar Rahmat, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PUPR Kalbar kepada *Jurnal Keluarga*.

Rahmat yang ditugaskan di Pontianak sejak 2017, mengatakan mulai 2016

pihaknya sudah membangun 19.500 unit rumah. “Ke depan dianggarkan 9.000-an unit,” jelasnya.

Rahmat mengatakan, dalam program di Kampung KB, Pemprov Kalbar mem-

Sebelum



Bantuan pembangunan rumah keluarga Demi, warga Desa Thang Raya, Kecamatan Beduai, Kabupaten Sanggau. (Foto: PUPR)

Sesudah



Foto: PUPR

Sebelum



Bantuan pembangunan rumah keluarga Delina, Desa Empirang Ujung, Kecamatan Balai, Kabupaten Sanggau. (Foto: PUPR)

Sesudah



Foto: PUPR



fokuskan pembangunan rumah dengan kategori tidak layak huni. "Tidak melihat siapa mereka," tandasnya.

Syarat untuk mendapatkan bantuan, antara lain WNI, tidak memiliki rumah, sudah berkeluarga, memiliki lahan dan lahan tersebut tidak dalam sengketa. Juga sesuai dengan tata ruang. Selain juga menempati hanya satu rumah tidak layak huni, penerima bantuan belum memperoleh bantuan perumahan stimulan swadaya, berpenghasilan maksimum upah minimum tingkat provinsi.

"Bersedia berswadaya dengan membentuk kelompok paling sedikit 20 orang agar saat membangun rumah, dilakukan secara bergotong-royong," katanya.

Dianggarkan per unit Rp 17,5 juta. Sebesar Rp 15 juta untuk material dan

sisanya ongkos tukang. "Tapi harus ada swadaya masyarakat, tidak mungkin uang sebesar itu bisa untuk membangun rumah. Pokoknya rumah tidak layak huni, itulah yang dibantu," ujar Rahmat.

**ALADIN**

Ada dua tahap untuk pencairan dana bantuan. Tahap pertama sebesar Rp7,5 juta. Bila rumah sudah 30% selesai, pencairan tahap kedua diajukan. Untuk biaya tukang, pencairan tahap pertama kalau rumah sudah berbentuk 50%. Tahap kedua sudah selesai 100%.

Bila lokasi terisolir, dipastikan tidak akan ada anggaran membangun fasilitas jalan. "Kami hanya ditugaskan membangun rumah, meningkatkan kualitasnya saja," ungkapnya.

Menurut Rahmat, Kementerian PUPR

hanya membangun sebatas atap, lantai dan dinding (aladin). Kalau ada rumah rusak dan tidak layak huni, Rahmat menegaskan instansinya tidak menanganinya.

"Dinas atau Kementerian PUPR tidak memandang dimana rumah harus dibangun, meski di daerah terpencil sekali pun. Risikonya, akan ada tambah biaya transportasi untuk tim teknis di tingkat kabupaten," katanya.

Berapa anggaran APBN yang disiapkan pemerintah untuk program ini? "Untuk tahun lalu tinggal mengalikan 512 unit dikalikan Rp 17,5 juta. Demikian juga halnya pada 2019 sebesar 6.000 unit dikali Rp 17,5 juta. Pada 2020 ditargetkan 9.000 unit dikali Rp 17,5 juta," terang Rahmat.

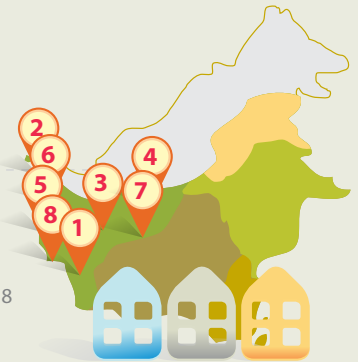
(Icha/sara)



Pejabat Kementerian PUPR meninjau pembangunan rumah di Kampung KB wilayah Kalimantan Barat. (Foto: PUPR)

**Lokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)**

Berasal dari APBN di Kampung KB Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018



No.	Kabupaten/Kota/Kecamatan	Desa/Kelurahan	Jumlah Rumah
1.	<b>KETAPANG</b> Kec. Delta Pawan Kec. Pemahan Kec. Sandai	Desa Suka Bangun Dalam	68 Unit
		Desa Lalang Panjang	21 Unit
		Desa Muara Jekak	22 Unit
2.	<b>SAMBAS</b> Kec. Pemangkat Kec. Paloh Kec. Selakau	Desa Perapakan	78 Unit
		Desa Kalimantan	25 Unit
		Desa Parit Kongsi	25 Unit
3.	<b>SANGGAU</b> Kec. Balai Kec. Entikong Kec. Beduai	Desa Empirang Ujung	75 Unit
		Desa Nekan	25 Unit
		Desa Thang Raya	25 Unit
4.	<b>KAPUAS HULU</b> Kec. Silat Hulu Kec. Silat Hilir Kec. Kalis	Desa Riam Tapang	71 Unit
		Desa Seberu	25 Unit
		Desa Bahenap	20 Unit
5.	<b>PONTIANAK</b> Kec. Pontianak Timur	Kel. Dalam Bugis	50 Unit
			26 Unit
6.	<b>SINGKAWANG</b> Kec. Singkawang Barat Kec. Singkawang Utara	Kel. Kuala	115 Unit
		Kel. Semelagi Kecil	24 Unit
7.	<b>MELAWI</b> Kec. Tanah Pinoh	Kel. Maris Permai	91 Unit
			25 Unit
8.	<b>KUBU RAYA</b> Kec. Sungai Raya	Desa Limbung	25 Unit
			30 Unit
<b>JUMLAH</b>			<b>512 Unit</b>



**Sebelum**

Bantuan pembangunan rumah keluarga Nurdiana, Desa Kalimantan, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas.

(Foto: PUPR)



**Sesudah**

Foto: PUPR

# Peta Keluarga Dibalik Gerakan Bangun Desa



Prof. Dr. Haryono Suyono. (Foto: MPC BKKBN)

**P**eta keluarga sebagai *roadmap* BKKBN disarankan digunakan sebagai peta dalam membangun desa. Peta ini agar dibagikan kepada seluruh kekuatan pembangunan di desa.

Saran itu datang dari Ketua Tim Pakar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDIT) Prof. Dr. Haryono Suyono.

Peta keluarga ini disebutnya sebagai pedoman dalam proses gerakan pembangunan di desa dan pemberdayaan masyarakat dan keluarga.

"Saya minta aparat BKKBN membantu aparat desa dalam mengajak keluarga mengikuti pemberdayaan, menelusuri peta sesuai tahapannya (mulai dari pra-Sejahtera hingga Sejahtera III-*plus*, red)," kata mantan Menko Kesra dan Taskin/

Kepala BKKBN ini, pada acara Rapat Koordinasi Teknis Program KKBPK, di Jakarta, akhir Februari.

Dikemukakan, setiap desa kini memiliki prioritas pembangunan. Intinya memperkuat infrastruktur desa, dan membangun masyarakat melalui empat prioritas utama yakni Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), embung desa dan sarana olah raga. Juga dua program pembangunan sarana utama, yakni sarana bidang ekonomi, dan sarana bidang sosial kemanusiaan.

"Mulai tahun 2018 ditambah prioritas padat karya tunai untuk menurunkan kemiskinan dan *stunting*," tambahnya.

Dengan mengikuti peta, Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dan pendamping desa (PD) dapat membantu

tugas-tugas aparat desa mencapai target yang ditentukan pemerintah.

Prof. Haryono mengajak agar Dana Desa diarahkan untuk mendukung prioritas utama. Kini dana desa berjumlah Rp 1 miliar lebih. Dana ini belum termasuk dana partisipasi dari keluarga kaya setempat, dana zakat, keuntungan usaha dan koperasi.

Dia juga mengajak BKKBN untuk mengembangkan kerjasama di desa bersama camat, kepala desa, ulama, Babinsa TNI-AD, dan TMMD (TNI Manunggal Membangun Desa), anggota PWRI (Persatuan Wredhatama Republik Indonesia), Badan Amal Zakat Nasional (Baznas), hingga donatur keluarga sejahtera III dan III-*plus*.

BKKBN dalam hal ini harus menonjolkan sasaran utama dan mengusahakan men-



Irtama BKKBN membuka Rakornis Kemitraan Program KKBPK Tingkat Nasional Tahun 2019. (Foto: MPC BKKBN)



Kita harus mendorong anak perempuan menjadi cerdas dan maju. Anak usia dini, khususnya perempuan; anak keluarga miskin dan anak yatim-piatu

dapat dukungan semua sektor di tingkat desa. Mereka adalah keluarga sejahtera, anak balita, perempuan dan penyandang disabilitas.

Kalau perlu adakan acara dengan peserta keluarga pra-sejahtera secara menyolok. "Selain itu PLKB dan relawan BKKBN hendaknya mendorong anak balita masuk PAUD," katanya.

"Dengan kerja yang merangsang kolaborasi, utamakan anak balita keluarga miskin ke PAUD. Kita harus mendorong anak perempuan menjadi cerdas dan maju. Anak usia dini, khususnya perempuan; anak keluarga miskin dan anak yatim-piatu diberikan prioritas dan dilatih menabung," tambahnya.

#### REVITALISASI

Prof. Haryono juga mengajak BKKBN dan TP PKK merevitalisasi Posyandu dan Polindes. Anjurkan menggunakan Posyandu yang telah ada sebagai forum pencegahan kematian anak dan ibu hamil, serta memantapkan KB serta menghindari HIV dan AIDS.

Tak lupa pula, dia menganjurkan pengembangan rumah kebun lengkap dengan tanaman bergizi. Juga mengembangkan gerakan penyedia makanan lokal melalui tanaman kebun bergizi dalam lingkungan rumah tangga.

Prof. Haryono berharap kepala desa menggunakan peta keluarga untuk memberdayakan keluarga pra-sejahtera. Mereka bersama PLKB dianjurkan mengajak masyarakat menggunakan Posyandu maupun klinik desa dan MCK yang sudah dibangun.

"Tapi saya dengar masyarakat agak segan, karena MCK yang masih baru sayang kalau dimanfaatkan," ujarnya berseloroh.

Menurut catatan *Jurnal Keluarga*, zaman Orde Baru hal ini pernah terjadi, karena bangunan MCK selalu disertai papan bertuliskan Proyek Inpres. Masyarakat menganggap karena bantuan Presiden,



TNI dan mitra kerja lainnya hadir pada acara Rakornis Kemitraan Program KKBPK. (Foto: MPC BKKBN)

harus dijaga kebersihannya dengan cara tidak dimanfaatkan.

Prof. Haryono juga berharap kepala desa dan BKKBN memprioritaskan keluarga pra-sejahtera untuk kegiatan padat karya dan kegiatan BUMDes.

Dia juga mengompromi PLKB agar rajin mengikuti kegiatan rembug desa.

"Jangan beralasan tidak diundang. Tidak diundang ya datang saja. Kalau perlu ajak ibu bidan. Pokoknya harus banyak usul untuk bisa disepakati dalam rembug desa tersebut," katanya.

#### TNI DI KAMPUNG KB

Sementara itu Paban III/Tahwil Ster Mabes TNI, Kolonel Kavaleri Harfuddin Daeng mengemukakan, di jajaran TNI ada satuan wilayah (Satwil) setingkat desa dengan kriteria tertentu, yang memadukan program KKBPK dan pembangunan sektor terkait dalam upaya meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat.

Dalam kaitan ini Babinsa adalah salah satu ujung tombak untuk membantu menyukseskan program KKBPK. Tugasnya sebagai pendamping PLKB.

Saat ini Babinsa dapat terjun langsung sebagai penyuluh dan penggerak lapangan KB setelah diberi kemampuan oleh BKKBN.

Sementara tugas dan tanggungjawab TNI dalam mendukung Kampung KB, menurutnya adalah melakukan koordinasi terus-menerus dengan BKKBN di daerah. Juga memberikan dukungan tenaga

yang memenuhi syarat untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

"TNI juga memberikan dukungan advokasi dan KIE yang memenuhi syarat dalam rangka penyelenggaraan program KKBPK," katanya.

"Kami juga memberikan fasilitas penggunaan fasilitas kesehatan TNI untuk pelayanan KB dan kesehatan reproduksi di rumah sakit milik TNI sesuai ketentuan yang berlaku," tambahnya.

Bukan itu saja. TNI juga memberikan dukungan tenaga medis dan paramedis yang memenuhi syarat untuk memberikan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi. Kemudian memberikan dukungan tenaga yang memenuhi syarat untuk program KKBPK dalam rangka pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

"Pokoknya kalau dengan BKKBN, hayo aja. Salam teritorial. Senyum, sapa dan silaturahmi," katanya.

Terkait Kampung KB, Prof. Haryono Suyono, menyarankan saatnya nama Kampung KB bergeser menjadi Kampung Sejahtera. Ini agar intervensi yang dilakukan banyak pihak semakin membumi.

Kepada *Jurnal Keluarga*, Prof. Haryono mengapresiasi komitmen Wakil Presiden Jusuf Kalla terhadap program KKBPK, termasuk Kampung KB. Perubahan nama, menurut Prof. Haryono sesuai dengan kondisi strategis bangsa yang saat ini memasuki era Revolusi Industri 4.0.

(her/san)



Foto bersama pejabat BKKBN dengan mitra kerja pada acara Rakornis Kemitraan Program KKBPK Tingkat Nasional Tahun 2019. (Foto: MPC BKKBN)

## Rakornis Kemitraan BKKBN, Apa Saja Hasilnya?

Pelaksanaan program KKBPK di Indonesia telah mengukir sejarah keberhasilan dalam menurunkan laju pertumbuhan penduduk dari 2,31 persen selama periode 1971-1980, menjadi 1,49 % periode 2000-2010 dan 1,36 persen selama periode 2010-2016.

Menurut Inspektur Utama (Irtama) BKKBN Agus Sukiswo, pada pembukaan Rakornis Kemitraan Program KKBPK Tingkat Nasional, di Hotel Kartika Chandra, akhir Februari, penurunan laju pertumbuhan penduduk ini konsisten dengan penurunan angka kelahiran total (TFR) dari 5,61 anak per wanita usia subur pada 1971 menjadi 2,38 pada tahun 2018.

Disamping penggunaan kontrasepsi yang terus meningkat, faktor penentu pengendalian angka kelahiran total, adalah peningkatan median usia kawin pertama perempuan.

Agus mengakui perempuan Indonesia menunjukkan kecenderungan menikah pada usia yang lebih matang, dari 18 tahun pada 1991, menjadi 21 tahun pada 2018. Penurunan angka kelahiran total ini telah merencanakan struktur umur penduduk untuk menciptakan peluang terjadinya bonus demografi yang dimulai sejak 2012.

Bonus demografi ditandai dengan rasio ketergantungan di bawah 50 per 100



Tamu undangan pada acara Rakornis Kemitraan Program KKBPK. (Foto: MPC BKKBN)

penduduk usia produktif. Diproyeksikan bonus demografi akan membuka jendela peluang pada tahun 2020 sampai 2030. Jika program Keluarga Berencana tetap menjadi prioritas pemerintah dan pemerintah daerah, usia bonus demografi akan lebih panjang dan akan memberi dampak bagi

pembangunan kesejahteraan.

Seiring dengan keberhasilan pengendalian penduduk dan terwujudnya momentum bonus demografi tersebut, tambah Agus, proporsi penduduk lanjut usia juga mengalami peningkatan. Untuk itu perlu diambil kebijakan dan langkah



yang tepat agar mereka lebih sejahtera di hari tua; dan tidak tua sebelum kaya.

#### 14.169 KAMPUNG KB

Menyinggung kehadiran Kampung KB, Irtama menjelaskan, sejak dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo pada 14 Januari 2016, sampai saat ini, per 27 Februari 2019; melalui laporan *online* Kampung KB, telah terbentuk sebanyak 14.169, tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Kegiatannya dititikberatkan pada pemberian pelayanan dasar dan pemberdayaan keluarga bersama sektor terkait melalui sumber pendanaan yang beragam.

Inovasi dan gerakan Kampung KB merupakan langkah konkret BKKBN dalam mengurangi angka kemiskinan dan penanggulangan gizi buruk melalui pendekatan keluarga. Kemiskinan dapat diputus melalui perencanaan kehidupan berkeuarga. Mereka dapat menentukan jumlah dan waktu yang ideal memiliki anak sehingga memberi kesempatan luas bagi perempuan Indonesia memasuki pasar kerja.

#### GIZI GANDA

Irtama dalam kesempatan ini juga

gizi, termasuk obesitas baik pada balita maupun orang dewasa.

Sekitar 37 persen, hampir 9 juta anak balita; mengalami *stunting* (*Riskesdas 2013*), mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi 30 persen dan Indonesia adalah negara dengan prevalensi *stunting* ke lima terbesar di dunia.

Anak kecil yang terjadi di Indonesia sebenarnya tidak hanya dialami oleh keluarga yang miskin dan kurang mampu, akan tetapi *stunting* juga dialami oleh keluarga yang tidak miskin/ yang berada di atas 40 persen tingkat kesejahteraan sosial dan ekonomi.

"Karena itu kami melalui program KKBPK di Kampung KB, berupaya meningkatkan sinergitas kegiatan bersama mitra kerja untuk ketahanan dan kesejahteraan keluarga," ujarnya.

#### IMPLEMENTASIKAN KEMITRAAN

Sementara itu, Plt Deputy Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi, BKKBN, M. Yani pada penutupan Rakornis mengharapkan seyogianya paparan para narasumber menjadi bahan penyusunan rencana tindak lanjut implementasi



Inspektur Utama BKKBN Agus Sukiswo saat memberikan sambutan. (Foto: MPC BKKBN)

dengan kewenangan, fungsi, dan tugas masing-masing seraya memperhatikan kondisi objektif di lapangan."

"Saya mengharapkan agar para peserta Rakornis menyampaikan semua yang diperoleh selama mengikuti Rakornis ini kepada segenap jajaran pengelola dan pelaksana program KKBPK di semua tingkatan wilayah."

"Saya instruksikan kepada seluruh unit kerja BKKBN Pusat dan perwakilan BKKBN provinsi untuk segera mengimplementasikan kemitraan yang berkualitas bersama para pemangku kepentingan dan mitra kerja serta menyusun rencana kerja di 2019."

M. Yani mengimbau para pemangku kepentingan dan mitra kerja, agar lebih proaktif dan tidak segan untuk berdiskusi dengan unit kerja dan Perwakilan BKKBN Provinsi terkait, dalam rangka merancang dan melakukan kegiatan bersama.

Kepada Direktur Bina Hubungan Antar Lembaga BKKBN beserta jajaran, M. Yani menginstruksikan untuk segera menyusun instrumen pemantauan dan evaluasi implementasi kerja sama antara BKKBN dan para pemangku kepentingan dan mitra kerja.

"Laporkan perkembangan implementasi kerja sama tersebut kepada saya secara berkala. Saya yakin BKKBN tidak dapat bekerja sendiri. Karena itu, saya sangat berharap agar kemitraan yang kita jalin tidak terhenti pada penandatanganan Kesepahaman Bersama."

"Namun, saya juga tidak ingin agar kemitraan kita, baik di tingkat pusat maupun daerah, tidak dilanjutkan dengan implementasi setelah acara Rakornis Kemitraan ini usai," tandas M. Yani. (her/sara)



Penandatanganan kesepahaman bersama dengan mitra kerja BKKBN. (Foto: MPC BKKBN)

menyinggung masalah gizi ganda. Indonesia sedang mengalami dan berusaha mengatasi permasalahan gizi ganda, yaitu kekurangan gizi seperti *wasting* (kurus) dan *stunting* (pendek) pada balita, anemia pada remaja dan ibu hamil serta kelebihan

kesepahaman bersama yang telah disepakati antara BKKBN dan para pemangku kepentingan dan mitra kerja.

"Kita harus mengambil langkah-langkah konkret melalui program yang aplikatif dan implementatif yang sesuai



Rapat Kerja Nasional Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, di Jakarta. (Foto: repro)

## Bersinergi dengan Seluruh Pemangku Kepentingan

**B**adan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengharapkan dapat berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Khususnya, menyusun, mengembangkan, serta menindaklanjuti berbagai kebijakan dan strategi Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).

Harapan tersebut disampaikan Sekretaris Utama (Sestama) BKKBN Nofrijal, di sela Rapat Kerja Nasional Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Rakernas BKKBN), di Jakarta, akhir Februari.

Dia berharap pelaksanaan dan kegiatan program KKBPK, lewat koordinasi antar seluruh pemangku kepentingan, bisa memberi manfaat secara langsung. "Baik bagi masyarakat perkotaan maupun pedesaan. Termasuk masyarakat kurang mampu yang bertempat tinggal di wilayah padat penduduk, wilayah nelayan, daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan," ujarnya.

Rakernas BKKBN menekankan pentingnya meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dengan daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam mencapai target rencana strategis 2015-2019.

Rakernas yang mengambil tema "Meningkatkan Sinergitas Implementasi Program Kerja Pusat dan Daerah dalam Mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang dan Keluarga Berkualitas" tersebut menekankan capaian rencana strategis 2015-2019.

Pada Rakernas itu, diselenggarakan pula Simposium Nasional tahun 2019 dengan tema "Tantangan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Pada Era Revolusi Industri 4.0". Dengan maksud untuk memastikan seluruh arah dan kebijakan serta strategi pemerintah yang disusun dapat terlaksana dengan terarah.

Nofrijal mengatakan, BKKBN bersama kementerian, lembaga mulai dari Bappenas, Kementerian Kesehatan, Kementerian Desa dan Transmigrasi, hingga Kemendagri sangat dekat dalam kesuksesan program KB.

Nofrijal juga menjelaskan dalam agenda Rakernas, pihaknya bersama *stakeholder* mempunyai program-program yang satu tujuan untuk menyejahterakan masyarakat dan keluarga.

"Semuanya menjelaskan kepada kita bagaimana kita mensinkronkan, mengintegrasikan program-program yang satu tujuannya menyejahterakan masyarakat dan keluarga."

"Apalagi saya dengan kementerian desa sudah ada MoU dan juga sangat intens untuk bersama-sama berada di desa mulai dari penyiapan database desa dan program-program yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi dan ada pendidikan di desa yang semuanya banyak mempunyai program-program yang strategis," paparnya.

### MANDAT NAWACITA

Seperti yang diketahui, BKKBN mendapat mandat untuk mewujudkan Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (Nawacita) terutama pada Cita ke-3, Cita ke-5 dan Cita ke-8. Kemudian dijabarkan dengan Arah Kebijakan dan Strategi dalam RPJMN 2015-2019.

Beberapa penyesuaian dan penajaman dilakukan melalui pengembangan Visi, Misi dan 9 Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (Nawacita). Selanjutnya dijabarkan menjadi Program dan Kegiatan Prioritas melalui Rencana Strategis (Renstra) BKKBN 2014-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019.

Sasaran strategis yang harus dicapai dalam Renstra Tahun 2015-2019 antara lain menurunkan rata-rata laju pertumbuhan penduduk (LPP) dari 1,38 % per tahun pada 2015 menjadi 1,21 % per tahun pada



2019. Menurunkan *Total Fertility Rate* (TFR) per perempuan usia reproduksi dari 2,37 tahun 2015 menjadi 2,28 tahun 2019, meningkatnya *Contraceptive Prevalence Rate* (CPR) semua metode dari 65,2 % menjadi 66 %.

Selain itu menurunkan kebutuhan ber-KB tidak terlayani (*unmet need*) dari jumlah pasangan usia subur dari 10,6 % pada 2015 menjadi 9,91 % pada 2019. Menurunnya *Age Specific Fertility Rate* (ASFR) dari 46 pada 2015 menjadi 38 per 1000 perempuan kelompok umur 15 - 19 tahun pada 2019. Juga menurunnya persentase kehamilan yang tidak diinginkan pada Wanita Usia Subur dari 7,1% tahun 2015 menjadi 6,6% pada 2019.

### PENGUATAN LANGKAH

Dalam upaya pencapaian sasaran strategis yang belum tercapai tersebut, BKKBN perlu melakukan berbagai langkah penguatan program KKBPK yang benar-benar memiliki daya ungkit terhadap upaya pencapaian target atau sasaran program. Selain juga penguatan kegiatan-kegiatan prioritas secara komprehensif dan berkelanjutan di seluruh tingkatan wilayah.

"Saya ingin pada rakernas ini terjalin hubungan kerja yang kuat antara pusat dan di daerah," ujar Sestama.

Ditekankannya, penguatan sinergitas dan komitmen para pemangku kepentingan dan mitra kerja di seluruh tingkatan wilayah wajib dilakukan. Dan diharapkan BKKBN dapat berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Terutama dalam menyusun, mengembangkan dan menindaklanjuti berbagai kebijakan dan strategi pembangunan KKBPK.

Harapannya, pelaksanaan program dan kegiatan dapat memberikan manfaat secara langsung bagi masyarakat.

"Kita ingin bonus demografi tertata baik. Hubungan kerja pusat dan daerah tertata baik. Termasuk juga pemahaman dan pengetahuan tentang penyuluh KB dan kebijakan yang ada di pusat di terjemahkan secara operasional oleh Bupati maupun Walikota," jelas Nofrijal.

Dengan sinergitas dan kemitraan seperti itu, diharapkan manfaat program KKBPK dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat baik perkotaan maupun pedesaan. Termasuk masyarakat kurang mampu yang bertempat tinggal di wilayah padat penduduk, wilayah nelayan, daerah terpencil, tertinggal, perbatasan dan sebagainya.

(her/sara)

## Suara dari Babel



Gubernur Bangka Belitung, Erzaldi Rosman. (Foto: MPC BKKBN)

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Erzaldi Rosman mendapat apresiasi dengan menjadi salah satu narasumber pada acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) BKKBN di BKKBN Pusat di Jakarta, akhir Februari.

Apresiasi ini tak lepas dari komitmen tegas Gubernur Erzaldi dalam menjalankan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Bangka Belitung. Gubernur Erzaldi juga didampingi Ketua TP PKK Babel, Melati Erzaldi, dan Kepala DP3ACSKB Babel, Susanti.

Dalam paparannya, Gubernur Erzaldi menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Babel

selalu mendukung berbagai upaya seperti menyediakan payung hukum regulasi dan kebijakan berupa Perda, Pergub, MoU, SK maupun surat edaran. Dan juga mengupayakan penyediaan sumber daya berupa SDM, sarana dan prasarana serta anggaran, program dan kegiatan yang mendukung program KKBPK di Babel.

Pemprov Babel sangat memperhatikan program KKBPK, ujarnya seraya memanggil Ketua TP PKK maupun Susanti. Kedua nama tersebut sering disebut sebagai upaya betapa Pemprov Babel benar-benar komit dengan program KKBPK.

Pemprov Babel juga intens melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota se-Babel serta instansi ataupun lembaga terkait guna menyukseskan program KKBPK di Babel.

Dia pun berharap Rakernas ini dapat menguatkan program KKBPK dalam prioritas nasional, terwujudnya Kampung KB sebagai episentrum program KKBPK, terpetakannya bonus demografi untuk kesejahteraan bangsa, meningkatnya akses dan kualitas pelayanan KKBPK, meningkatnya kinerja Penyuluh KB.

Juga meningkatnya cakupan advokasi dan KIE, meningkatnya aksi kemitraan dan jejaring kerja program KKBPK, serta merekomendasikan strategi program KKBPK dalam memasuki era revolusi industri 4.0 serta pelaksanaan RPJMN IV 2020-2024. (her/san)



Gubernur Bangka Belitung beserta jajarannya usai mengikuti Rakernas BKKBN. (Foto: repro)



Deputi Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga BKKBN, M. Yani, didampingi TP PKK Kota Banjarbaru, Hj Ririen Nadjmi Adhani berkunjung ke Kampung KB Pumpung beberapa saat lalu. (Foto: sara)

Gubernur Kalimantan Selatan:

## “Mari, Kita Pertajam Lagi Program KB”

Kalsel Siap Jadi Tuan Rumah Harganas 2019

Tanggal 29 Juni mendatang bangsa Indonesia akan kembali memperingati Hari Keluarga Nasional atau Harganas. Ini merupakan peringatan yang ke-26 kali sejak Harganas diselenggarakan pertama kali tahun 1993.

Mengambil lokasi di Kota Banjarbaru, puncak peringatan Harganas XXVI Tahun 2019 secara nasional akan digelar pada awal Juli 2019. Tema Harganas 2019 adalah “Hari Keluarga, Hari Kita Semua”, dengan slogan “Cinta Keluarga, Cinta Terencana”.

Jauh-jauh hari Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor, menyatakan daerahnya siap menerima kunjungan sekitar 12.000 tamu saat berlangsungnya acara akbar tersebut.

Mengapresiasi penetapan wilayahnya sebagai puncak peringatan Harganas 2019, gubernur Sahbirin mengatakan pencapaian program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan

Keluarga (KKBPBK) cukup berjalan baik di wilayahnya.

Sukses itu, kata gubernur, dilandasi semangat ‘jangan malas’. Untuk itu diingatkan, seluruh komponen yang ada di Kalsel, baik unsur pemerintah dan masyarakat, harus memiliki semangat untuk juga menyukseskan Harganas 2019 di Kalsel.

“Berdasarkan capaian itu, Kalsel selanjutnya ditetapkan sebagai lokasi penyelenggaraan puncak peringatan Harganas 2019,” ujar Sahbirin, seraya berharap acara akbar ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Kalsel.

Kepada *Jurnal Keluarga*, gubernur Sahbirin mengajak keluarga-keluarga untuk memulai semuanya dari keluarga.



“Mari kita jaga dan pelihara dan kita awali mulai dari rumah sendiri, untuk membangun suatu masyarakat sejahtera lahir dan batin, dan tetap memegang teguh pada Dua Anak cukup’.

Sahbirin mengingatkan bahwa luas bumi tidak bertambah. Tanah yang ada dimanfaatkan oleh warga bumi. Luasnya semakin berkurang lantaran populasi manusia terus bertambah.

“Kalau kita lengah apa yang terjadi, akhirnya bumi penuh manusia. Akibatnya penduduk bumi akan mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Salah satu upaya untuk meminimalkan, kita harus komit melaksanakan program KB. Ini sudah dilakukan oleh BKKBN dan instansi lainnya

dengan dukungan penuh masyarakat. Mari kita pertajam lagi,” ujar Sahbirin.

Sementara itu, Deputi Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga BKKBN, M. Yani, saat menyajikan pokok-pokok rencana kegiatan Harganas 2019 di depan para kepala dinas instansi terkait, menyatakan apresiasinya atas kesiapan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait menyongsong kegiatan akbar Harganas.

“Mendengar seluruh masukan OPD terkait, saya menilai Kalsel sudah siap menyelenggarakan puncak peringatan Harganas dengan baik. Apalagi provinsi ini sudah punya pengalaman sebagai tuan rumah Hari Pangan Sedunia 2018 yang sukses,” ujar M. Yani.

## DARI FESTIVAL HINGGA GELANGGANG DAGANG

Berbagai kegiatan akan digelar dalam mewarnai peringatan Harganas, baik pra puncak peringatan maupun pasca acara. Di antaranya Festival Penggalang Ceria, *GenRe Camp*, *One Stop Service* pelayanan untuk anak, *One Day for Children* untuk anak-anak miskin, dan beberapa kegiatan seminar di antaranya tentang perkawinan anak.

Saat ini persentase perkawinan anak di Kalsel mencapai 30 persen, dianggap tepat seminar tersebut digelar.

Gelanggang dagang juga ikut digelar, dengan menghadirkan kelompok UPPKS dan UMKM, dengan diikuti ratusan unit usaha kecil-menengah. \*\*



Kegiatan BKB di Kampung KB Pumpung. (Foto: sara)

## KUIS KKBPK

## UJI PENGETAHUAN PROGRAM KEPENDUDUKAN, KB DAN PEMBANGUNAN KELUARGA

1. Sebutkan dua mitra strategis BKKBN?
2. Di kota mana peringatan Hari Keluarga Nasional 2019 dipusatkan secara nasional?
3. Apa judul cover Jurnal Keluarga edisi 1 tahun 2019?

- Jawaban dapat dikirimkan melalui email majalah\_jk@yahoo.com, twitter @bkkbnoofficial, instagram @bkkbnoofficial
- 3 Pemenang terpilih akan mendapatkan hadiah menarik dari BKKBN
- Majalah *Jurnal Keluarga* dapat diakses di website [www.bkkbn.go.id](http://www.bkkbn.go.id)



Kegiatan kelompok UPPKS di Kampung KB Pumpung.  
(Foto: MPC BKKBN)



## Kampung KB Hadirkan Program “Keroyokan”

kelompok-kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pusat Informasi Keluarga (PIK) Remaja.

Semua kegiatan itu secara bertahap mulai tumbuh dan berkembang di tujuh Kampung KB yang saat ini ada di Kota Banjarbaru. Peresmian penetapan kali pertama Kampung KB di Banjarbaru terjadi pada 2016.

Ketua Tim Penggerak PKK Kota Banjarbaru, Hj Ririen Nadjmi Adhani, menunjukkan multi manfaat keberadaan Kampung KB. Manfaat Kampung KB bagi masyarakat, antara lain kesadaran meningkat, terutama dalam hal pengendalian kelahiran, sehingga angkanya menurun.

“Yang juga pasti kesejahteraan masyarakat meningkat. Antara lain berkat kerjasama antara TP PKK dengan dinas-dinas di Kota Banjarbaru,” jelas Ririen.

Kerjasama itu dituangkan dalam bentuk berbagai pelatihan, seperti membuat disain purun (khas lokal), motif

batik, pembuatan brosur, kue dan lain-lain. Pelatihan ini membantu meningkatkan kehidupan perekonomian keluarga.

Menurut Ririen, Kampung KB berkembang karena adanya kerjasama lintas instansi. Intervensi program dilakukan secara “keroyokan” (bersama dan segera).

Instansi yang terlibat di Kampung KB, antara lain Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dinas ini membantu pengaspalan jalan. Termasuk perbaikan bangunan. Dinas Tanaman Pangan, sangat membantu dalam hal ketahanan pangan. Dinas Koperasi memberikan pelatihan keterampilan usaha.

“Mereka semua terlibat untuk meningkatkan pengetahuan yang muaranya untuk kesejahteraan masyarakat,” tambah Ririen.

Istri Walikota Banjarbaru tersebut mengklaim sudah 494 kepala keluarga yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan keluarga di Kampung KB.

**B**anyak kegiatan masyarakat dilakukan setelah terbentuknya Kampung KB. Sebut saja Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) hingga Bina Keluarga Lansia (BKL).

Juga tumbuh dan berkembang





Lesehan Pumpung sebagai tempat kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pelayanan KB bersama mitra kerja BKKBN di Kampung KB Pumpung. (Foto: MPC BKKBN)



Galeri kegiatan Kampung KB Pumpung. (Foto: MPC BKKBN)

**PERAN TP PKK**

Sejauh mana peran TP PKK Kota Banjarbaru? Menurut Ririen, pihaknya melakukan intervensi dengan cara melakukan pembinaan program. Anggarannya didapat dari dinas-dinas terkait. Pembinaan itu, di antaranya

pembuatan bordir hingga kue.

“Inilah yang kita sebut bentuk kemitraan. Namun kami belum puas dengan dengan kemajuan ini. Selain untuk membumikan kegiatan dinas-dinas, kami juga harapkan Kampung KB Pumpung menjadi tempat wisata. Karena Kampung

KB ini dekat pantai,” jelasnya.

Kampung KB Pumpung di Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, merupakan Kampung KB andalan Kota Banjarbaru karena berbagai program tumbuh dan berkembang baik di sana.

Masyarakat di Pumpung secara bertahap mulai merasakan perubahan hidup yang membaik. Gerak perekonomian masyarakat semakin tumbuh dan berkembang. Kampung KB telah menggugah masyarakat Pumpung untuk menjadikan pantainya lokasi wisata.

“Ke depan selain untuk menyejahterakan masyarakat sekitar, Kampung KB ini akan menjadi percontohan daerah lain. Jadi, bukan sekadar ada,” jelas Ririen.

Kampung KB Pumpung akan menjadi salah satu “jualan” keberhasilan Pemkot Banjarbaru dalam program pemberdayaan keluarga pada peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) XXVI Tahun 2019.

(Her/sara)

# Tingkatkan Koordinasi, BKKBN Gelar Sosialisasi DAK 2019

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyelenggarakan Sosialisasi dan Konsultasi Pelaksanaan Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Sub Bidang Keluarga Berencana Regional I di The Zuri Palembang, beberapa waktu lalu.

Kegiatan ini diselenggarakan sebagai upaya meningkatkan koordinasi dan membangun sinergi dalam pelaksanaan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) melalui DAK Sub Bidang KB Tahun Anggaran 2019.

Juga sebagai forum evaluasi bersama antara Tim Pengendali DAK Subbidang Keluarga Berencana (KB) dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)-KB Kabupaten/Kota sebagai penerima DAK Subbidang KB atas Pelaporan DAK Subbidang KB Tahun 2018 sekaligus untuk Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019 yang lebih baik.

Hadir dalam kesempatan tersebut Gubernur Sumatera Selatan yang diwakili oleh Asisten III Provinsi Sumatera Selatan Edward Juliarta, Sekretaris Utama BKKBN Nofrijal, Inspektur Utama BKKBN Agus Sukiswo, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama BKKBN, Kepala Perwakilan BKKBN Sumatera Selatan Waspi.

Ikut hadir Kepala OPD-KB Kabupaten/Kota beserta Pengelola DAK Subbidang KB di Kabupaten dan Kota, para Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi selaku Tim Pengendali DAK.

DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan

sesuai dengan prioritas nasional

Sekretaris Utama BKKBN Nofrijal, dalam sambutannya mengatakan, "Bidang KB telah memperoleh DAK selama lebih dari 10 tahun. Alokasi pagu DAK KB terus mengalami peningkatan sejak 2008 sampai 2019 baik alokasi maupun jumlah kabupaten dan kota sasarannya."

Perkembangan ini, lanjutnya, membuktikan betapa besarnya perhatian Pemerintah Pusat dalam upaya untuk

meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

## TIGA REGIONAL

Kegiatan ini terbagi menjadi tiga regional. Regional I meliputi 162 Kabupaten dan Kota dari 10 Provinsi di Pulau Sumatera dan Banten. Diselenggarakan di Palembang 23-25 Januari 2019.

Regional II meliputi 170 kabupaten dan kota dari 10 provinsi wilayah Jawa, Bali dan Kalimantan. Diselenggarakan di Yogyakarta 30 Januari-1 Februari 2019.

Adapun Regional III meliputi 176 Kabupaten dan Kota dari 12 Provinsi di Sulawesi, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara dan Nusa Tenggara. Diselenggarakan di Denpasar 30 Januari-1 Februari 2019.

## ALOKASI DAK

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor



Sekretaris Utama BKKBN Nofrijal memukul gong saat membuka acara Sosialisasi dan Konsultasi Pelaksanaan Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) 2019 Sub Bidang Keluarga Berencana Regional I di The Zuri Palembang. (Foto: Humas BKKBN)





Sejumlah pejabat yang hadir dalam acara Sosialisasi dan Konsultasi DAK 2019 diantaranya, Sestama BKKBN Nofrijal, Irtama BKKBN Agus Sukiswo, Asisten III Provinsi Sumatera Selatan Edward Juliarta, Kepala Perwakilan BKKBN Sumatera Selatan Waspi dan lainnya. (Foto: Humas BKKBN)

129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019, BKKBN mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Sub bidang KB sebesar Rp 2,559 triliun.

Rinciannya, DAK Fisik sebesar Rp 624 miliar; DAK Penugasan/penanggulangan *stunting* sebesar Rp 7,8 miliar; dan DAK Nonfisik/Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) sebesar Rp 1,967 triliun.

DAK dialokasikan hanya kepada daerah tertentu. Formulasi penetapan daerah penerima dan besaran pagu DAK Fisik sebelum dan sesudah tahun 2015 berbeda. Sebelumnya, dalam penetapan kelayakan daerah penerima ada kriteria umum/khusus/teknis.

Setelah 2015 DAK berbasis usulan atau proposal (yang menyampaikan usulan kebutuhan/kegiatan dapat diberikan alokasi pagu DAK). Maka, setiap tahun jumlah kabupaten/kota penerima bervariasi.

Sekretaris Utama BKKBN Nofrijal menegaskan, alokasi anggaran DAK yang terus meningkat sangat potensial kontribusinya dalam pelaksanaan Program KKBPK di Kabupaten dan Kota. Sehingga pemanfaatannya harus saling bersinergi



...pemanfaatannya harus saling bersinergi untuk mendukung pencapaian sasaran RPJMN 2015-2019



untuk mendukung pencapaian sasaran RPJMN 2015-2019.

“Kegiatan-kegiatan di daerah diharapkan dapat memberikan daya ungkit terhadap keberhasilan program KKBPK di wilayah tugas masing-masing guna mendukung tercapainya sasaran prioritas pembangunan (KKBPK) dalam mendukung penurunan *Total Fertility Rate* (TFR) dari 2,28 anak pada akhir tahun 2019 menjadi 2,1 pada akhir tahun 2025,” ujar Nofrijal.

Dalam upaya pengendalian DAK



Sekretaris Utama BKKBN Nofrijal saat memberikan sambutan. (Foto: Humas BKKBN)

Subbidang KB Fisik dan Non Fisik/BOKB Tahun 2019, akan dilaksanakan Audit Bersama antara Inspektorat Utama BKKBN, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, dan Inspektorat daerah Provinsi.

“Mengingat kegiatan-kegiatan strategis BKKBN berada di lini lapangan, maka tidak mungkin mampu hanya dilaksanakan oleh jajaran BKKBN sendiri. Saya mengharapkan dukungan dan kerja sama dari para pemangku kepentingan dan mitra kerja, baik di tingkat pusat



Tamu undangan yang hadir dalam acara Sosialisasi dan Konsultasi DAK 2019. (Foto: Humas BKKBN)

maupun daerah (provinsi, kabupaten, dan kota),” ungkap Nofrijal.

Sementara itu, Asisten III Pemprov Sumatera Selatan, Edward Juliarta, berharap melalui pertemuan ini dapat memberikan persepsi yang sama antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten - Kota sehingga memastikan program dapat berjalan dan bermanfaat dengan baik.

“KKBPK merupakan program jangka panjang yang sesuai Visi dan Misi Provinsi Sumatera Selatan: Sumsel Maju Untuk Semua,” jelas Edward Juliarta.

## REGIONAL I

BKKBN menyelenggarakan Sosialisasi dan Konsultasi Pelaksanaan Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Sub Bidang Keluarga Berencana Regional I di The Zuri Palembang.

DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan Prioritas Nasional.

Kegiatan ini terbagi menjadi tiga regional wilayah yakni regional I meliputi 162 Kabupaten dan Kota dari 10 Provinsi di Pulau Sumatera dan Banten diselenggarakan di Palembang 23-25

Januari 2019.

Regional II meliputi 170 Kabupaten dan Kota dari 10 Provinsi wilayah Jawa, Bali dan Kalimantan diselenggarakan di Yogyakarta 30 Januari-1 Februari 2019.

Regional III meliputi 176 Kabupaten dan Kota dari 12 Provinsi di Sulawesi, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara dan Nusa Tenggara diselenggarakan di Denpasar 30 Januari-1 Februari 2019.

Sekretaris Utama BKKBN Nofrijal, dalam sambutannya mengatakan, Kegiatan ini diselenggarakan sebagai upaya meningkatkan koordinasi dan membangun sinergi dalam pelaksanaan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) melalui DAK Sub Bidang KB Tahun Anggaran 2019.

Selain itu, kegiatan ini juga sebagai forum evaluasi bersama antara Tim Pengendali DAK Subbidang Keluarga Berencana (KB) dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD-KB) Kabupaten/Kota sebagai penerima DAK Subbidang KB atas Pelaporan DAK Subbidang KB Tahun 2018 sekaligus untuk Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019 yang lebih baik.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019, BKKBN mendapatkan

Dana Alokasi Khusus (DAK) Sub bidang KB sebesar Rp 2,559 triliun.

Dana ini terbagi atas DAK Fisik sebesar Rp 624 miliar, DAK Penugasan/ penanggulangan *stunting* sebesar Rp 7,8 miliar dan DAK Nonfisik/Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) sebesar Rp 1,967 triliun.

Sekretaris Utama BKKBN Nofrijal menegaskan, Bidang KB telah memperoleh DAK selama lebih dari 10 tahun. Alokasi pagu DAK KB terus mengalami peningkatan sejak tahun 2008 sampai dengan 2019 baik alokasi maupun jumlah kabupaten dan kota sasarannya. Perkembangan ini membuktikan betapa besarnya perhatian Pemerintah Pusat dalam upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

DAK dialokasikan hanya kepada daerah tertentu, formulasi penetapan daerah penerima dan besaran pagu DAK Fisik sebelum dan sesudah Tahun 2015 berbeda (sebelumnya, dalam penetapan kelayakan daerah penerima ada kriteria umum/khusus/ teknis), setelah itu berbasis usulan atau proposal (yang menyampaikan usulan kebutuhan/kegiatan dapat diberikan alokasi pagu DAK) sehingga setiap tahun jumlah kabupaten/kota penerima bisa bervariasi. (Humas/icha)



# Tokoh Agama Kumpul, Bahas Karakter Kebangsaan Perspektif Agama

Puluhan tokoh agama, baik dari Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha maupun Khonghucu; menggelar pertemuan untuk saling memperluas wawasan dalam kegiatan Pengembangan Karakter Kebangsaan Perspektif Keagamaan.

Mereka terlibat dalam kegiatan yang digelar oleh Forum Antar Umat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan (Fapsedu) bekerjasama dengan Direktorat Bina Hubungan Kelembagaan dan Kemitraan (Ditbinhub) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), di Hotel Dafam, Jakarta, belum lama ini.

Tujuan diskusi untuk memberikan wawasan nilai-nilai karakter kebangsaan para tokoh agama dan tokoh masyarakat, sebagai wahana sharing nilai-nilai karakter

kebangsaan perspektif keagamaan. Selain juga sebagai ajang melakukan orientasi bagi tokoh agama dan tokoh masyarakat tentang pentingnya nilai-nilai karakter kebangsaan sebagai salah satu aspek program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK).

Satu hal menarik dari perhelatan tersebut, adalah harapan lahirnya *output* pemahaman spesifik dan mendasar bagi para tokoh agama tentang pentingnya nilai-nilai kebangsaan.

Selain itu, diharapkan pula muncul visi bersama di kalangan para tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk secara bersama-sama membangun kesadaran akan pentingnya nilai-nilai karakter berbangsa dan bernegara dalam bingkai program KKBPK.

Direktur Advokasi, Komunikasi,

Informasi dan Edukasi, Sugiyono, mewakili Plt Deputy Adpin yang berhalangan hadir, menyambut gembira Fapsedu sebagai forum yang tidak mencampuri urusan keimanan para pemeluknya. Melainkan lebih pada wahana perjuangan untuk mengatasi problem bangsa. Antara lain dalam bidang kependudukan dan keluarga berencana serta pembangunan keluarga.

“Sebab, masalah kependudukan tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah, tetapi juga semua umat beragama. Rasa kebersamaan inilah yang melandasi lahirnya Fapsedu pada 17 Juni 2008, yang dideklarasikan para pemuka agama di Jakarta,” tambahnya.

Sugiyono berpesan agar Fapsedu mengembangkan program KB, keluarga sejahtera dan kependudukan secara menyeluruh. Khusus masalah kependudukan, agar menjadi lebih fokus. (her)



Direktur Advokasi KIE, Sugiyono didampingi Kholil Nafis, Ketua Fapsedu bersama sejumlah pengurusnya dan tokoh lintas agama berdiskusi membahas nilai-nilai kebangsaan dan membangun kesadaran akan pentingnya karakter berbangsa dan bernegara dalam bingkai program KKBPK. (Foto: MPC BKKBN)

Dwia Aries Tina P

# Guru Besar Sosiologi Peduli Kependudukan

**P**rof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA, Rektor Universitas Hasanudin (Unhas) dan juga Ketua Forum Rektor, menegaskan perlunya para mahasiswa yang melakukan kuliah lapangan, atau kuliah kerja lapangan (KKN) tidak melupakan tema kependudukan.

“Kuliah langsung adalah praktik di lapangan yang sesuai dengan keahlian bidang ilmu yang dituntut,” ujar Guru Besar Sosiologi Unhas ini menjawab *Jurnal Keluarga*.

Baik selaku Rektor Unhas maupun Ketua Forum Rektor, Dwia berkomitmen akan terus melakukan kerjasama, kolaborasi dan kemitraan dengan BKKBN.

“Tak ada alasan perguruan tinggi menolak ajakan bergandeng tangan dengan BKKBN,” tutur Dwia yang pernah berseloroh satu kampung dengan Presiden Jokowi yang dari Solo, sementara Dwia dari ‘Solowesi’.

“Dan saya sebagai Ketua Forum Rektor sangat mendukung kegiatan ini,” tambah Rektor Unhas dua periode ini,

di sela simposium nasional berkaitan dengan Rakernas BKKBN tahun 2019 yang berlangsung di BKKBN pusat, Jakarta, akhir Februari lalu.

## KKN TEMATIK

Masing-masing perguruan tinggi, kata Dwia, melaksanakan program kependudukan dengan pendekatan spesifik. Khusus untuk Unhas, program ini diimplementasikan dalam bentuk KKN tematik.

Dwia yang kelahiran Tanjungkarang (Lampung) pada 19 April 1964 ini menegaskan sangat setuju dengan KKN Tematik. Sebagai contoh dia menjelaskan saat ini Unhas telah mengirimkan ratusan mahasiswa KKN, dalam beberapa gelombang, untuk melakukan pembinaan terhadap beberapa desa.

“Mereka berasal dari berbagai fakultas, sehingga pengembangan di sasaran dapat dilakukan dengan perspektif keilmuan yang beragam,” kata Prof. Dwia yang juga mengikuti berbagai pendidikan singkat

dan non gelar di sejumlah negara.

Program KKN tematik ini juga dilakukan Prof. Dr. Haryono Suyono ketika menjadi Ketua Yayasan Damandiri –sangat relevan dengan pendekatan Unhas dalam *social management* melalui *University Social Responsibility* (Tanggung Jawab Sosial Universitas).

Unhas juga mempunyai label ‘*communiversity*’, suatu gagasan untuk menjadikan Unhas sebagai universitas yang berbasis komunitas, di mana hubungan antara kampus dan masyarakat berlangsung secara sinergis.

Unhas diketahui memiliki Pusat *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang akan berhubungan dengan pusat-pusat SDGs lainnya di kawasan Indonesia Timur. SDGs juga akan menjadi pusat pengembangan SDM, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi.

Mantan Wakil Ketua Himpunan Indonesia Untuk Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial (HIPIS) ini pernah mengkritik adanya kecenderungan ilmuwan sosial

Dwia Aries Tina Pulubuhu. (Foto: repro)





Dwia Aries Tina Pulubuhu dalam berbagai ekspresi. (Foto: repro)



Dwia Aries Tina Pulubuhu, Rektor Universitas Hasanudin saat acara wisuda. (Foto: repro)

terpinggirkan. Marjinalisasi ini justru membuat peran ilmuwan sosial tidak kelihatan.

“Padahal, pada era Orde Baru, ilmuwan sosial diberdayakan untuk menyelesaikan masalah-masalah bangsa. Misalnya, konsep pengentasan kemiskinan, masalah kependudukan melalui program keluarga berencana, politik untuk stabilisasi sosial, dan lain-lain,” papar Prof. Dwia, mantan pengurus Ikatan Sosiologi Indonesia (ISI), yang pernah diketuai Prof. Haryono Suyono.

**ERA 4.0**

Dalam Revolusi Industri 4.0 perguruan tinggi memiliki tantangan bagaimana bisa melahirkan keluaran yang memiliki kecerdasan dan kepedulian sosial. “Kami ingin berbuat yang terbaik. Ingin menghasilkan keluaran berkualitas dan berdaya saing. Yang penting, ingin berkonstrubusi untuk kemaslahatan bangsa dan negara,” ujarnya.

Dia melanjutkan, “Bersama pemerintah, dalam hal ini BKKBN; kami ingin mewujudkan bangsa ini sejahtera, berkeadilan, berdaulat dan bermartabat.”

Berbicara mengenai SDM yang berkualitas dan berdaya saing, kata Prof.

Dwia, di bidang ekonomi perlu ada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, (UMKM) berbasis ekonomi digital, agro dan industri kemaritiman. Bidang sosial mutlak ada keluarga harmonis era digital, dan program KB berbasis digital.

Sementara bidang lingkungan diperlukan kesediaan air dan udara sehat, serta teknologi IT ramah lingkungan. Bidang kesehatan dituntut adanya ‘tele medicine’, dan Jaminan Kesehatan Sosial (JKS) berbasis IT yang merata.

Bidang pangan perlu ada inovasi pangan olahan bergizi dan murah, bidang pendidikan tersedianya literasi IT, talent digital, dan pendidikan karakter.

Menyinggung Program KB di Era Industri 4.0, Prof. Dwia mengharapkan adanya sinergitas data pelayanan terpadu, program promosi dengan sosialisasi untuk generasi milenial.

Khusus untuk generasi kini, perlu dikembangkan milenialperrgroup untuk KB, melakukan peningkatan partisipasi masyarakat yang terintegrasi dengan bidang edukasi dan pembangunan.

Dukungan regulasi juga sangat diharapkan dan tentunya ditemukannya teknik baru kontrasepsi.

(her/san)

# Periode Emas Generasi Berkualitas

Salah satu komponen terpenting dalam pembangunan kesehatan adalah terpenuhinya kebutuhan gizi masyarakat, terutama pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

**D**alam sambutannya di puncak Hari Gizi Nasional (HGN) yang diperingati setiap 25 Januari, Menkes Nila F Moeloek mengingatkan periode kehamilan hingga anak berusia dua tahun merupakan peluang emas dalam mencetak generasi berkualitas bebas *stunting* dan masalah gizi lainnya.

"Intervensi pada periode 1.000 HPK tidak boleh diabaikan, karena menjadi penentu tingkat pertumbuhan fisik, kecerdasan dan produktivitas seseorang. Ini merupakan periode emas dan bila gagal dilakukan menjadikan anak berpotensi *stunting* dan masalah gizi lainnya," ujar Menkes.

Karena itu, lanjut Menkes, arah pembangunan kesehatan saat ini dititikberatkan pada upaya promotif preventif. Upaya ini dinilai memberikan dampak kesehatan yang lebih luas dan lebih efisien dari sisi ekonomi.



Menkes Nila Moeloek menggendong bayi saat kunjungan kerja di Papua. (Foto: repro)



Intervensi pada periode 1.000 HPK tidak boleh diabaikan, karena menjadi penentu tingkat pertumbuhan fisik, kecerdasan dan produktivitas seseorang. Ini merupakan periode emas dan bila gagal dilakukan menjadikan anak berpotensi stunting dan masalah gizi lainnya



Menkes Nila Moeloek. (Foto: repro)

Sebagai investasi utama pengembangan sumber daya manusia, pembangunan kesehatan berkelanjutan memang mutlak diperlukan. Salah satu komponen utamanya adalah perbaikan gizi masyarakat.

Kekurangan gizi pada masa janin dan anak usia dini akan berdampak pada perkembangan otak dan rendahnya kemampuan kognitif yang dapat mempengaruhi prestasi belajar dan keberhasilan pendidikan.

Selain itu, kata Menkes, kurang gizi yang dialami pada awal kehidupan juga berdampak pada peningkatan risiko gangguan metabolik yang berujung pada kejadian penyakit tidak menular pada usia dewasa, seperti diabetes tipe II, stroke, penyakit jantung dan lainnya.

Dalam jangka panjang, hal ini akan berdampak pada menurunnya produktivitas. Selanjutnya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kemiskinan dan kesenjangan di masyarakat.

Upaya bersama berbagai pemangku kepentingan, dalam pandangan Menkes perlu terus dilakukan. Caranya, dengan mengutamakan komitmen, kampanye, konvergensi program, akses pangan bergizi dan *monitoring* program.

**BERSINERGI**

Langkah ke depan, seperti dilansir Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kementerian Kesehatan, upaya tersebut perlu bersinergi dengan sistem pangan global. Penerapannya melalui pola gizi seimbang untuk mencapai ketahanan pangan dan gizi, kesehatan, pembangunan

pertanian dan lingkungan secara terpadu.

Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI, dr. Kirana Pritasari, MQIH memaparkan, bahwa saat ini Indonesia masih dihadapkan pada tantangan berbagai permasalahan gizi. Yaitu, tingginya prevalensi *stunting* (pendek/kerdil), *under weight* (berat kurang), *wasting* (kurus), dan anemia pada ibu hamil serta semakin meningkatnya obesitas pada orang dewasa (*Risikedas, 2018*).

Berbagai masalah gizi tersebut dapat

menjadi salah satu faktor penghambat peluang Indonesia menjadi negara maju.

Berbagai permasalahan gizi saat ini, baik gizi kurang termasuk stunting dan gizi lebih, terjadi hampir di seluruh strata ekonomi masyarakat baik di perdesaan maupun perkotaan. Hal ini menunjukkan bahwa yang mendasari terjadinya masalah gizi bukan hanya kemiskinan, namun juga kurangnya pengetahuan masyarakat akan pola hidup sehat dan pemenuhan gizi yang optimal.

(her/san)



Permasalahan gizi pada balita berdampak pada risiko gangguan kesehatan saat dewasa. (Foto: repro)

# Stunting di Indonesia di Atas Ambang Batas WHO



Foto: iStockphoto.com/Andrius Stasiunas

Selain masalah kelebihan gizi penyebab obesitas, ada kekurangan gizi pemicu *stunting*. Ironisnya, Indonesia masih dicekam dengan persoalan kecukupan gizi.

**P**revalensi *stunting* di Indonesia masih tergolong tinggi, memang bukan persoalan baru. Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 menunjukkan prevalensi *stunting* di Indonesia sebesar 30,8 persen.

Yang benar-benar menjadi persoalan, angka 30,8 persen ternyata jauh di atas ambang yang ditetapkan WHO (Badan Kesehatan Dunia) sebesar 20 persen.

Dokter Anak Spesialis Nutrisi dan Penyakit Metabolik pada Anak, Dr. dr. Damayanti Rusli Sjarif, memaparkan *stunting* pada anak akan mengakibatkan hambatan perkembangan, penurunan fungsi kekebalan, penurunan fungsi kognitif, dan gangguan sistem pembakaran lemak.

Sedangkan jangka panjang pada masa dewasa, akan muncul gejala obesitas, penurunan toleransi glukosa, penyakit jantung koroner, hipertensi dan osteoporosis.

Apakah *stunting* ini bisa diperbaiki? Menurutnya, bisa bila pasien *stunting* masih berusia dua tahun. Lebih dari usia itu, dokter harus kerja ekstra keras.

Faktor utama dalam memperbaiki *stunting* adalah makanan. Kalau anak mau makan, dia bisa membaik. "Namun, kalau pun membaik, dia tidak bisa seperti yang Tuhan berikan," ujarnya di sela acara media *workshop* MilkVensation memperingati Hari Gizi Nasional di Jakarta. Hari Gizi Nasional diperingati setiap 25 Januari.

Dalam masalah *stunting*, bukan pendek yang ditakutkan tapi kognitifnya. Kalau di atas dua tahun *stunting* belum bisa diperbaiki, IQ bisa berada di bawah anak-anak yang tidak *stunting*.

"Harusnya mereka jadi pemimpin. Tapi karena ketidakmampuan otaknya, akan menjadi masalah. Kalau dibiarkan jangka panjang, 65 persen alami IQ di bawah 90. Sekolah hanya sampai 3 SMP bisa mengikutinya. Kalau IQ 70 tambah berat lagi," jelasnya.

Hal ini akan menyebabkan Indonesia kehilangan peluang bonus demografi. Tata laksana *stunting* yang utama menurut dr Damayanti adalah perbaikan nutrisi yang cukup energi dan protein hewani.

## SESUAI KEBUTUHAN OTAK

Pakar gizi ini, seperti dilansir *republika.com*; mengatakan asupan makanan anak usia di bawah dua tahun harus disesuaikan dengan komposisi yang dibutuhkan otak. Ia menyebut di bawah dua tahun penting bagi anak untuk mendapatkan lemak baik dalam jumlah cukup.

"Di bawah dua tahun, makanannya harus mengandung komposisi gizi untuk otak, karbohidrat, lemak, dan protein," katanya, seraya menambahkan 60 persen dari komposisi otak anak adalah lemak.

Komposisi zat gizi tersebut bisa didapatkan dari air susu ibu (ASI) yang berupa 5,2 persen protein, 39,4 persen karbohidrat, dan 55,4 persen lemak.

Oleh karena itu, asupan ASI eksklusif selama enam bulan dan dilanjutkan dengan makanan pendamping ASI hingga dua tahun dinilai sangat penting untuk mencegah terjadinya malnutrisi pada anak.

Setelah enam bulan, kandungan gizi protein lemak dan karbohidrat dari ASI mulai menurun. Dengan begitu makanan pendamping ASI yang memenuhi kandungan gizi dan sesuai komposisi otak sangat diperlukan.

"Karbohidrat, lemak, protein itu yang membentuk otak anak sampai dua tahun. Komposisinya harus diperhatikan," katanya.



**Dalam masalah *stunting*, bukan pendek yang ditakutkan tapi kognitifnya**



Damayanti menekankan pentingnya asupan protein hewani pada anak yang bisa didapat dari telur, susu sapi, daging, atau ikan. Banyak orang tua memberikan makanan pada anak di bawah dua tahun berupa buah-buahan dan sayuran.

## DUA TAHUN PERTAMA KEHIDUPAN

Dokter Damayanti menjelaskan, pemenuhan gizi lengkap pada dua tahun pertama masa kehidupan memiliki peran



krusial. Setelah pemberian ASI eksklusif pada tahun pertama kehidupan, anak membutuhkan makanan pendamping dengan kandungan karbohidrat, lemak, dan protein. Faktanya di Indonesia, konsumsi asupan protein hewani masih tergolong rendah, sehingga banyak kasus stunting terjadi.

“Padahal, investasi protein hewani sangatlah penting, mengingat kandungan asam amino esensial terlengkap di dalamnya, yang dapat membantu pertumbuhan dan kecerdasan otak anak. Sumber protein hewani terbaik dapat ditemukan pada susu, telur, unggas, ikan, serta daging,” jelasnya.

Masalah *stunting* ini sebenarnya sudah lama terjadi. Namun saat itu belum diperhatikan. Kasus *stunting* baru mencuat setelah WHO mencanangkan penghapusan kemiskinan dari muka bumi. Mereka kemudian membuat deklarasi *Millenium Development Goals* (MDGs).

Salah satu parameter MDGs adalah bebas dari kelaparan yang ditentukan dari grafik pertumbuhan anak yang bagus apa tidak. Barulah terlihat di dunia banyak anak-anak yang tumbuh pendek. “Kalau negara pelayanannya bagus, *stunting* itu di bawah 20 persen,” ujarnya.

**MENGKHAWATIRKAN**

Kondisi berdasarkan data Rikesdas 2018 tersebut dinilai *Corporate Affairs Director* PT Frisian Flag Indonesia, Andrew F Saputro sangat mengkhawatirkan. Ini mengingat permasalahan *stunting* tidak sekadar terhambatnya pertumbuhan tinggi badan pada anak.

Stunting juga dapat menyebabkan hambatan kecerdasan, menimbulkan kerentanan terhadap penyakit menular dan tidak menular, hingga penurunan produktivitas pada usia dewasa.



Pemerintah sudah menetapkan pencegahan *stunting* sebagai salah satu program prioritas nasional. Lebih dari sekadar tantangan di bidang kesehatan, masih tingginya angka *stunting* memiliki implikasi terhadap kualitas generasi penerus bangsa, ujarnya.

Berbicara tentang penyebabnya, pemenuhan gizi yang tidak mencukupi khususnya pada fase 1.000 hari pertama kehidupan, ditengarai menjadi faktor terbesar timbulnya *stunting*.

Kata gizi sebenarnya berasal dari kata serapan bahasa Arab *ghidza* yang mempunyai arti makanan sehat. Bagi Indonesia, gizi menjadi hal penting sampai saat ini, utamanya dalam hal perbaikan gizi. Saking pentingnya hingga muncul slogan “Empat Sehat Lima Sempurna”.

**SEJAK AWAL KEMERDEKAAN**

Persoalan gizi sebenarnya sudah diperkenalkan sejak lama oleh Bapak Gizi Nasional Indonesia, yaitu Prof Poerwo Soedarmo sejak awal kemerdekaan. Karena gizi memang sangat penting dalam kehidupan manusia.

Pada awal kemerdekaan, kondisi gizi masyarakat Indonesia memang tidak terlalu baik. Kondisi itu memaksa Menteri Kesehatan RI, J Leimena meminta Prof Poerwo untuk mengepalai Lembaga Makanan Rakyat (LMR) yang waktu itu bernama *Institut Voor Volksvoeding* (IVV).

Permintaan itu dimaksudkan agar lembaga tersebut fokus mengatasi masalah gizi masyarakat Indonesia. IVV merupakan lembaga penelitian kesehatan, waktu itu.

Kondisi masyarakat Indonesia saat itu bisa dibayangkan berada di area kemiskinan dan kurangnya kesadaran akan makanan sehat. Potret yang terlihat, kondisi kesehatan masyarakat sangat memprihatinkan dan terbelakang.

Melihat kondisi tersebut, Poerwo melaksanakan beberapa program untuk mengatasinya. Prioritas pertama dan utama pada saat itu adalah menumbuhkan kesadaran serta pendidikan tentang pentingnya gizi yang sehat pada masyarakat. (her/san)

# Urgensi Konseling Pra Nikah Guna Peningkatan Ketahanan Keluarga

Oleh :

Anita Latifah, S.Si, MH\* dan  
Anindita Dyah Sekarpuri, S.Psi, MSR\*\*

## A. Pendahuluan

Di Indonesia prevalensi perkawinan usia anak telah mengalami penurunan lebih dari dua kali lipat dalam tiga dekade terakhir, tetapi masih merupakan salah satu yang tertinggi di kawasan Asia Timur dan Pasifik. Merujuk pada data Susenas tahun 2017, 25 persen perempuan menikah sebelum usia 18 tahun. Sedangkan data SDKI 2017 menyebutkan angka 17 persen untuk perempuan yang pernah menikah sebelum usia 18 tahun.

Penggerakan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) merupakan sebuah upaya sistematis yang harus terarah dan berkesinambungan, dilakukan dengan melalui pendekatan persuasif dan adanya komitmen yang kuat dari berbagai pihak, sehingga salahsatu program Penundaan Usia Perkawinan, tidak hanya dilakukan oleh berbagai kalangan secara parsial-parsial, tetapi dilakukan komprehensif. Tentu ini tidak mudah, tetapi tidak ada yang sulit jika visi dan misi sama dalam upaya menciptakan negara yang hebat melalui revolusi mentalnya. Salah satu peran dari lini lapangan adalah bagaimana program ini dapat terlaksana dengan baik hingga menjadi bagian dari perubahan pemikiran masyarakat akan pentingnya batas usia perkawinan dalam membentuk sebuah generasi yang tangguh dan cerdas.

Pemuda adalah generasi harapan bangsa yang merupakan bagian dari penduduk usia produktif. Di pundaknya segala permasalahan bangsa ini menjadi tanggung jawabnya kelak. Pemuda adalah aktor pembangunan, sumber kekuatan moral, kontrol sosial dan agen perubahan. Sehingga Pemuda yang mewarisi negeri ini adalah pemuda yang harus kuat secara jasmani maupun rohani. Jika pemuda yang hadir di negeri ini adalah pemuda yang lemah maka bagaimana akan mampu



Anita Latifah



Anindita Dyah Sekarpuri

menerima estafet pembangunan negeri ini, sementara dirinya masih sibuk dengan segala permasalahan diri ini bahkan justru menjadi masalah baru yang harus dipecahkan.

Menurut UU RI No 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, yang dimaksud dengan pemuda adalah warga negara Indonesia yang berusia 16 – 30 tahun. Pada tahun 2014, Sekjen PBB merekomendasikan target khusus dalam tujuan pembangunan berkelanjutan pasca 2015 untuk menghapus usia perkawinan anak. Rekomendasi ini didukung oleh 116 negara termasuk Indonesia, tetapi dengan ikut meratifikasi, tetapi ternyata masih ada PR bagi pemerintah sebagai upaya penundaan usia perkawinan. Terutama dalam aspek legal formalnya.

KUA mengadakan Bimbingan Perkawinan dengan dasar pelaksanaan berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 373/2017, tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi calon Pengantin, karena adanya himbauan dari Kemenag dalam rangka upaya meminimalisir jumlah perceraian di Indonesia,

terutama pada usia pernikahan di bawah 5 tahun. Tujuan Bimbingan Perkawinan pra nikah bagi calon pengantin adalah merupakan ikhtiar pemerintah melihat tingginya tingkat perceraian yang terjadi. Selain itu diharapkan Calon Pengantin (Catin) bisa membangun keluarga yang mempunyai pondasi yang kokoh, karena banyak pasangan Catin yang belum tahu cara mengelola keluarga.

Adapun materi wajib dari Bimbingan Perkawinan ada 8, yaitu, 1. Membangun Landasan Keluarga Sakinah, 2. Merencanakan Perkawinan Yang Kokoh Menuju Keluarga Sakinah, 3. Dinamika Perkawinan, 4. Kebutuhan Keluarga, 5. Kesehatan Keluarga, 6. Membangun Generasi Yang Berkualitas, 7. Ketahanan Keluarga dalam Menghadapi Tantangan Kekinian dan 8. Mengenali dan Menggunakan Hukum Untuk Melindungi Perkawinan Keluarga.

Kegiatan ini terkadang disebut juga pendidikan pra nikah, karena berisi beberapa materi pernikahan yang perlu diketahui oleh para Catin seperti hak dan kewajiban seorang istri dan suami,



bagaimana berumah tangga yang baik, bagaimana jika ada masalah rumah tangga, sampai simulasi akad nikah dan beberapa wejangan-wejangan lainnya yang diberikan oleh pihak KUA kepada para Catin dengan harapan agar sharing ilmu ini dapat menjadi bekal dalam berumah tangga kelak, sehingga setelah menikah, para peserta kegiatan ini dapat lebih bijak dalam menghadapi masalah dan angka perceraian dapat diminimalisir.

Kebanyakan para Catin kurang mengetahui informasi secara jelas dari pihak KUA bahwa kegiatan ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan buku nikah. Mayoritas para Catin mengetahui wajinya mengikuti kegiatan penataran ini dari pengalaman teman yang sudah menikah, termasuk saya.

KUA memang biasanya memberitahukan kepada para Catin untuk menghadiri kegiatan penataran pra nikah yang jadwal dan tempatnya telah ditentukan oleh pihak KUA, namun jarang sekali menjelaskan bahwa hal ini bersifat wajib dan merupakan salah satu syarat untuk bisa mendapatkan buku nikah sehingga tak sedikit pula para Catin yang menyepelekan kegiatan ini dan tidak menghadirinya. Ada yang beralasan sedang bekerja, karena memang kegiatan ini dilakukan selama 1-2 hari pada hari dan jam kerja, ada pula yang hanya sekedar malas untuk menghadirinya, padahal ia tidak mengetahui konsekuensi dari ketidakhadirannya, yaitu buku nikah akan ditahan oleh pihak KUA.

### B. Perjuangan Revisi Undang-Undang Perkawinan

Definisi perkawinan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 1 menyatakan Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga dapat dinyatakan bahwa Perkawinan adalah upaya untuk melanjutkan keturunan demi keberlangsungan hidup manusia. Di Indonesia yang menganut sistem *civil law* yang menjadikan kehidupan masyarakat selalu berdasarkan pada hukum yang terkodifikasi maka keberadaan undang-undang sebagai payung hukum dalam perkawinan sangatlah penting.

Permohonan uji materil untuk Pasal 7 telah menimbulkan perdebatan di Indonesia. Batas Usia Perkawinan yang tercantum dalam UU Perkawinan tersebut telah dicoba untuk direvisi tetapi ternyata

Semakin muda seseorang untuk melakukan perkawinan maka makin panjang masa reproduksinya sehingga makin muda seseorang nelangsungkan perkawinannya maka makin banyak pula anak yang dilahirkannya



gagal, karena MK menolak pada tanggal 18 Juni 2015 dengan alasan bahwa perubahan usia perkawinan merupakan wewenang DPR. Orang tua dalam UU No 1/1974 menunjukkan legalitasnya dalam memberikan persetujuan agar anak dapat menikah secara sah pada usia 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Bahkan, orangtua anak perempuan yang berusia di bawah 16 tahun dapat menikahkannya anak perempuan mereka walau masih sangat muda dengan mengajukan permohonan pada petugas perkawinan atau pengadilan negeri agama untuk memberikan dispensasi.

Jika merujuk pada Batas Usia Perkawinan yang direkomendasikan oleh Komite Hak Anak yang diratifikasi oleh Indonesia dan sesuai dengan UU Perlindungan anak tahun 2002 yang mendefinisikan anak adalah setiap orang dibawah usia 18 tahun (Pasal 2 ayat (1) dan yang mengharuskan orangtua untuk mencegah perkawinan usia anak (pasal 26, 1c) maka jelas terjadi adanya disharmonisasi antar Undang-Undang di negeri ini yaitu Undang-Undang No 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

Hal ini patut menjadi sebuah peringatan bagi kita, tentang keseriusan pemerintah dalam memikirkan implikasi dari batas usia perkawinan dalam kehidupan masyarakatnya, karena selama ini pemerintah dinilai telah abai. Tidak bisa dinafikan dan ditunggu-tunggu lebih lama bahwa perlu adanya keseriusan baik dari legislatif, eksekutif maupun yudikatif dalam upaya peningkatan batas usia perkawinan demi generasi masa depan.

### C. Keluarga Muda Indonesia dalam Angka

Indonesia diindikasikan pada tahun 2028 – 2031 akan mengalami ledakan penduduk usia kerja atau yang diistilahkan dengan bonus demografi, sehingga dapat diartikan pula akan terjadi peningkatan jumlah keluarga muda sebagai implikasi dari faktor jumlah usia tersebut.

Dari Data Sensus Penduduk Tahun 2010 menyatakan bahwa jumlah pemuda di Indonesia sebanyak 61,83 juta jiwa atau sekitar 24,53 persen dari 252,04 juta jiwa penduduk Indonesia. Pemuda mempunyai jumlah yang paling kecil dibandingkan dengan jumlah penduduk yang berusia di bawah 16 tahun (76,68 juta jiwa) dan penduduk diatas 30 tahun (113, 52 juta jiwa). Rasio jenis kelamin perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki dengan laju pertumbuhan penduduk 1.49 persen per tahun.

Pengetahuan remaja tentang HIV/AIDS berdasarkan hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017 meningkat bila dibandingkan dengan hasil SDKI 2012. Dari survei yang dilakukan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) itu diketahui 92% dari 9.971 remaja perempuan usia 15 hingga 24 tahun memiliki pengetahuan tentang HIV/AIDS. Angka itu naik dari hasil SDKI 2012 yang hanya 89%. Pada remaja laki-laki sebanyak 86% dari 12.612 orang berusia 15-24 tahun telah memiliki pengetahuan tentang HIV/AIDS, atau naik bila dibandingkan dengan SDKI 2012 yang hanya 85%. Jumlah terbesar remaja yang mengetahui tentang HIV/AIDS ada di perkotaan sebanyak 94,7% untuk perempuan dan 91% laki-laki

Dari paparan tersebut, maka dapat dilihat bahwa setelah adanya bonus demografi, dikhawatirkan Indonesia akan mengalami *baby boom*. Dapat dinyatakan

bahwa terjadinya *baby boom* bukan sebuah pertanda baik jika tidak dibarengi dengan kemampuan negeri ini dalam mensejahterakan masyarakatnya. Tentu ini menjadi bahan kajian bagaimana upaya simultan dan komprehensif dilakukan guna menyelesaikan dari satu masalah kependudukan ke masalah kependudukan yang lain di Indonesia ini.

#### D. Kawin Muda dan Kehamilan Dini

Kesehatan merupakan modal utama yang sangat diperlukan untuk pembangunan Indonesia. Tentu sehat disini adalah sehat jasmani, rohani dan juga sosial. Pemuda sebagai elemen intelektual memiliki peran strategis bagi pembangunan. Sehingga perlu adanya kemampuan bagi pemuda untuk mengetahui kualitas kesehatan dirinya, termasuk di dalamnya kesehatan reproduksi.

Perkawinan merupakan sarana untuk melanjutkan keturunannya dan berhubungan dengan pertumbuhan penduduk dalam hal ini fertilitasnya. Menurut Wirosuhardjo (1981) bahwa semakin muda seseorang untuk melakukan perkawinan maka makin panjang masa reproduksinya sehingga makin muda seseorang nelangsungkan perkawinannya maka makin banyak pula anak yang dilahirkannya. Rendahnya tingkat kawin usia pertama adalah masalah krusial bagi Indonesia yang memiliki tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi.

Perkawinan dalam usia muda, tentu akan membawa sebuah konsekuensi logis bagi pasangan muda tersebut, terutama perempuan yang memiliki kemampuan untuk melanjutkan keturunan melalui proses kehamilan dan kelahiran. Kondisi yang mungkin terjadi pada perempuan muda yang mengalami proses kehamilan dan persalinan dini dengan tubuh yang belum matang untuk mengalami proses tersebut yaitu kematian dan keadaan tidak normal bagi ibu. Anak perempuan usia 10-14 tahun memiliki risiko lima kali lebih besar untuk meninggal dalam kasus kehamilan dan persalinan daripada perempuan usia 20-24 tahun, dan secara global kematian yang disebabkan oleh kehamilan menyebabkan penyebab utama kematian anak perempuan usia 15-19 tahun.

Risiko yang harus dihadapi oleh perempuan muda yaitu harus siap menghadapi komplikasi yang terkait dengan persalinan seperti fistula obstetri,

infeksi, perdarahan hebat, anemia dan eklampsia. Begitupun dengan prolapsus uteri dapat terjadi pada perempuan yang kawin muda dan kehamilan dini. Prolapsus uteri yaitu penurunan sebagian atau seluruhnya bagian kandungan ke vagina.

Bayi yang dilahirkan karena perkawinan dini juga memiliki risiko kematian yang lebih tinggi, dan kemungkinannya dua kali lebih besar untuk meninggal sebelum usia satu tahun dibandingkan dengan anak-anak yang dilahirkan oleh seorang ibu yang berusia dua puluh tahunan. Bayi yang dilahirkan pun memiliki kemungkinan yang lebih tinggi untuk lahir dalam kondisi prematur, dengan berat badan lahir rendah dan kekurangan gizi. Hal ini berhubungan langsung dengan perempuan muda yang belum cukup usia yang harus mengalami proses kehamilan dan kelahiran, dimana mereka sendiri kekurangan gizi dan tubuh mereka belum sempurna. Ketika perempuan remaja masih dalam proses pertumbuhan, maka kebutuhan gizi pada tubuhnya akan bersaing dengan kebutuhan gizi pada janinnya.

Berkaca pada tingginya angka kematian Ibu dan Bayi/Balita maka salah satu upaya pencegahan dari hal tersebut adalah dengan memperhatikan batas usia kehamilan, sehingga perlu adanya upaya progresif bagi penyelesaian masalah ini. Tidak cukup pemerintah berupaya dengan melakukan kajian di atas kertas, tetapi perlu adanya intensifikasi *below the line* bagi penurunan angka kehamilan muda melalui penyuluh Keluarga Berencana yang tersebar di Indonesia. Penyuluh Keluarga Berencana dapat membantu pencegahan pernikahan muda dan kehamilan dini dengan koordinasi pada level unit paling kecil dalam masyarakat yaitu keluarga.

#### E. Konseling Pranikah Sebagai Sebuah Keharusan

Pasangan calon suami istri memiliki beberapa indikator yang menyatakan keadaan sehat, salahsatu indikator tersebut yaitu memiliki kondisi kesehatan reproduksi yang baik.

Kesehatan reproduksi adalah keadaan yang menunjukkan kondisi kesehatan fisik, mental, dan sosial seseorang dihubungkan dengan fungsi dan proses reproduksinya termasuk di dalamnya tidak memiliki penyakit atau kelainan yang mempengaruhi kegiatan reproduksi tersebut.

Reproduksi menjadi salahsatu bagian dan seringkali menjadi masalah dalam

siklus kehidupan manusia. Kurangnya informasi dapat menyebabkan permasalahan di waktu yang akan datang yang jika tidak segera ditangani akan menjadi permasalahan serius. Pasangan suami istri dapat saling melengkapi jika masing-masing calon pasangan tersebut memiliki pengetahuan yang cukup mengenai kesehatan reproduksi. Karena kesehatan reproduksi adalah tanggung jawab bersama antara suami dan istri. Kedudukan hak maupun kewajiban dalam hal ini setara bagi suami maupun istri.

Menurut Ali Murtadho, bimbingan dan konseling perkawinan merupakan salahsatu layanan konseling yang semakin memiliki pengaruh penting seiring dengan kompleksitas masalah manusia di masa kini. Pentingnya bimbingan konseling pernikahan karena beberapa aspek, antara lain masalah perbedaan individu, masalah kebutuhan, masalah perkembangan individu dan masalah latar belakang sosio kultural.

Adapun informasi yang dapat diberikan pada saat KIE Pranikah yaitu antara lain menjaga kesehatan reproduksi keluarga, dengan pokok bahasa yaitu perbedaan organ, fungsi, masa dan dampak reproduksi pada laki-laki dan perempuan, hak dan kewajiban reproduksi laki-laki dan perempuan, keluarga berencana dan tuntutan agama terkait masa reproduksi dan KB. Selain itu dapat pula disisipkan materi tentang kesetaraan gender dalam pernikahan sehingga dapat menghindari KDRT. Bentuk ketidaksetaraan gender dalam kehidupan berumah tangga yaitu adanya *stereotip* (pelabelan kepada perempuan atau laki-laki, misalnya : laki-laki kuat, perempuan lemah, perempuan emosional, laki-laki rasional), subordinasi (yang diutamakan adalah laki-laki terlebih dahulu baru perempuan), marginalisasi (perempuan ditempatkan sebagai orang yang tidak memiliki peran penting), dan beban ganda (beban kerja perempuan lebih lama dan lebih banyak, perempuan dituntut menjadi ibu rumah tangga sekaligus pencari nafkah keluarga).

Selain tentang yang disebut diatas, informasi mendetail yang dapat diberikan pada kie pranikah yaitu informasi tentang kehamilan, persalinan dan nifas, dimana di dalamnya dapat dikenalkan bagaimana menunda kehamilan dengan kontrasepsi yang tepat, tanda-tanda kehamilan, cara menghitung usia kehamilan dan menentukan taksiran persalinan, memeriksa kehamilan, proses kehamilan,



menjaga kehamilan, nutrisi makanan ibu hamil, kehamilan dan persalinan berisiko karena 4 terlalu (1. terlalu muda untuk hamil (kurang dari 20 tahun), 2. terlalu tua untuk hamil (lebih dari 35 tahun), 3. terlalu sering hamil (anak lebih dari 3), 4. terlalu dekat atau terlalu rapat jarak kehamilannya (kurang dari 2 tahun) dan 3 terlambat (1. terlambat mengambil keputusan untuk mencari upaya medis ke darurat,, 2, terlambat tiba di fasilitas kesehatan, dan 3, terlambat mendapat pertolongan medis yang adekuat), tanda bahaya kehamilan, kesehatan jiwa ibu hamil, program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K). Persalinan, Perawatan Pasca Kelahiran, Alat Kontrasepsi, IMD, ASI, informasi tentang IMS, Infeksi Saluran Reproduksi dan HIV/AIDS, Informasi tentang Deteksi Dini Kanker Leher Rahim dan Kanker Payudara, Informasi tentang gangguan dalam kehidupan seksual suami istri, mitos pada perkawinan.

Merujuk pada Gibsom dan Mitchell (1995) yang menyatakan bahwa Konseling kelompok cenderung lebih efektif dibandingkan dengan konseling individu, dengan asumsi sebagai berikut :

1. Manusia itu berorientasi kelompok. Orang-orang saling melengkapi, membantu dan menikmati satu sama lain. kelompok merupakan suatu tempat yang alami bagi terjadinya proses tersebut.
2. Manusia berusaha memenuhi kebutuhannya yang paling mendasar dan bersifat pribadi-sosial melalui kelompok, meliputi kebutuhan untuk mengetahui dan tumbuh secara mental, dengan demikian, kelompok merupakan jalan yang paling alami dan expeditious untuk belajar.
3. Secara konsekuen, kelompok merupakan tempat yang paling berpengaruh dalam teknik-teknik pertumbuhan, belajar, pengembangan pola perilaku, gaya *copying*.

KIE Pranikah jika dilakukan secara berkelompok akan lebih efektif dan efisien secara waktu bagi penyelenggara, sehingga koordinasi dengan Kementerian Agama adalah sesuatu hal yang mutlak yang harus dilakukan, melalui kerjasama program BP4 di KUA. Sehingga salah satu upaya penyelesaian masalah pendewasaan usia perkawinan terutama dari penundaan anak pertama pada pasangan muda yang belum cukup usia menurut kesehatan tetapi telah melaksanakan perkawinan karena diperbolehkan oleh Undang-Undang No

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat dilaksanakan.

#### F. Peran Penyuluh KB dalam Kesuksesan PUP dan PAP

Definisi Penyuluh Keluarga Berencana dalam Perka BKKBN No 12 Tahun 2017 tentang Pendayagunaan Tenaga penyuluh Kependudukan, keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga selanjutnya disebut PKB adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi standar kompetensi dan kualifikasi tertentu yang diberi tugas tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang sebagai jabatan fungsional tertentu untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan, evaluasi dan pengembangan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga. Selanjutnya definisi dari petugas Lapangan keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat PLKB adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi standar kompetensi dan kualifikasi tertentu yang diberi tugas tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang sebagai jabatan pelaksana untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan, evaluasi dan pengembangan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.

PKB dan PLKB yang disebut sebagai Penyuluh KKBPK adalah sebuah profesi yang memiliki peran penting dalam keberlangsungan dan kesuksesan Pendewasaan Usia Perkawinan dan Penundaan Anak Pertama. Perannya krusial karena mampu langsung berinteraksi dengan masyarakat sehingga proses penyampaian informasi akan lebih efektif dan efisien.

#### G. Penutup

Dalam upaya peningkatan ketahanan keluarga, konseling pra nikah dan KIE yang dilakukan oleh Penyuluh KKBPK adalah strategi yang paling tepat dalam menyampaikan program PUP dan PAP dengan aksesibilitas pada generasi muda yang tidak diragukan lagi. Di Indonesia, Penyuluh KKBPK tersebar di berbagai penjurur wilayah negeri ini, sehingga ini adalah aset bagi BKKBN dalam menyampaikan informasi agar tepat sasaran. Kehadiran Penyuluh KKBPK dapat menjembatani program yang ada di beberapa sektor. Misalkan Program Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin yang terdapat dalam Program Kementerian Agama melalui BP4, maka Penyuluh KKBPK

dapat melakukan intervensi program PUP dan PAP pada program tersebut. Tentunya ini harus dibarengi dengan adanya komitmen bersama pada tataran pemangku kebijakan, sehingga proses intervensi ini dapat berjalan tidak hanya di beberapa lokasi saja, akan tetapi menjadi program dan isu nasional sehingga semua lini lapangan dapat melakukan hal yang sama di lokasi binaannya.

Pemerintah daerah dapat mengeluarkan peraturan yang mewajibkan adanya konseling pra nikah sebagaimana yang dilakukan oleh Pemerintah DKI Jakarta bagi calon pengantin yaitu harus konseling dan tes kesehatan terlebih dahulu. Jika lolos tes, calon pengantin akan mendapatkan Sertifikat Layak Kawin yang akan jadi syarat untuk menikah. Tes kesehatan dan konseling bisa dilakukan di beberapa fasilitas kesehatan yang ada di Jakarta. Fasilitas kesehatan yang dimaksud adalah puskesmas, laboratorium ataupun rumah sakit baik milik pemerintah maupun swasta.

Peraturan ini sudah berlaku sejak 8 Januari 2018 lalu. Persyaratan Sertifikat Layak Kawin ini tercantum dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta Nomor 185 Tahun 2017 Tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin. Tes kesehatan dan konseling bisa dilakukan di puskesmas atau rumah sakit terdekat.

Hal ini akan lebih efektif jika dilakukan bersama-sama lintas sektor. Penyuluh KKBPK dapat memberikan kontribusi yang positif bagi keberlangsung program pendewasaan usia perkawinan dan upaya penurunan angka kematian ibu, bayi dan balita serta menciptakan generasi muda yang kuat dan tangguh sebagai agen perubahan negeri ini menuju Indonesia yang sejahtera.

#### DAFTAR PUSTAKA :

- Badan Pusat Statistik. 2014. Statistik Pemuda Indonesia. Jakarta : BPS.
- Badan Pusat Statistika. 2016. Kemajuan Yang Tertunda : Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia Berdasarkan Hasil Susenas 2008 – 2012 dan Sensus Penduduk 2010. Jakarta : BPS.
- Ali Murtadho. 2009. Konseling perkawinan perspektif agama-agama. Semarang : Walisongo Press.

\* : Penyuluh KB Kabupaten Cianjur BKKBN Provinsi Jawa Barat

\*\* : Widyaiswara BD KKB Bogor



Sejumlah sampan dihias dengan umbul-umbul dan berbagai pesan Keluarga Berencana pada lomba Sampan Bidar di Kampung KB Desa Tanjung, Kecamatan Sekadau Hilir. (Foto: MPC BKKBN)



## KB Dibalik Destinasi Wisata *Sekadau*

Ilah gebrakan yang dilakukan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kalimantan Barat, Drs H Kusmana.

Pada Desember 2018, Ayah Uung, sapaan akrabnya; menghadiri penobatan Raja Kusuma Negara Sekadau yang bergelar Pangeran Agung Sri Negara II, Gusti Mahmud Effendi di Istana Kusuma Negara, Bumi Lawang Kuari Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat.

Pelaksanaan ini berkaitan juga dengan hari jadi Kabupaten Sekadau yang diisi dengan beberapa kegiatan. Antara lain pergerakan kemitraan di Kampung KB Desa Tanjung, Kecamatan Sekadau Hilir, dengan menampilkan perlombaan sampan bidar.

Kegiatan ini merupakan kerjasama antara BKKBN Kalbar dengan Pemerintah Kabupaten Sekadau dan Festival Budaya Bumi Lawang Kuari.

Pesta rakyat dan diisi dengan perlombaan sampan bidar ini diikuti setidaknya 134 peserta. Digelar di Kampung KB Desa Tanjung, kata Kusmana dalam wawancara dengan *Jurnal Keluarga* (JK), di sela acara Anugerah Kencana, di Gandaria City, Jakarta.

Acara penobatan antara lain dihadiri Bupati Sekadau, raja-raja di Nusantara, raja-raja dari negara-negara sahabat (Serawak, Filipina dan Thailand), pejabat BKKBN pusat maupun Perwakilan BKKBN Kalbar.

### LOMBA BIDAR

Menurut Kusmana, semua kegiatan sosialisasi program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) harus dilakukan melalui berbagai momentum. Kuncinya, kegiatan tersebut dapat diterima masyarakat.

“Dengan begitu akan dengan mudah mereka memahami makna pentingnya menjalankan program KKBPK, sebagai kebutuhan yang dapat dirasakan manfaatnya untuk menuju keluarga berkualitas,” katanya.

Sebab itu, momentum pengangkatan Yang Mulia Raja Kusuma Negara bergelar Pangeran Agung Sri Negara II Gusti Muhammad Efendi di Sekadau dijadikan momentum sosialisasi program KKBPK. Sekaligus untuk melestarikan budaya lokal agar tetap lestari. Sekaligus juga menjadi wahana pengembangan sektor pariwisata.

Karena itu, agar memikat, dalam acara itu peserta lomba bidar (biduk lancar), yang dibuka oleh Kepala Perwakilan BKKBN Kalbar; memperebutkan total hadiah Rp 15 juta. Syaratnya, setiap bidar dihias pesan-pesan Ayo Ikut KB, GenReTadakKawen Jude dan bendera logo BKKBN.

Hiasan-hiasan tersebut diberikan gratis oleh BKKBN. Tidak heran kalau peserta bukan hanya dari Sekadau, tapi ada yang dari Kabupaten Kapuas Hulu, Sintang dan Kabupaten Melawi.

“Pokoknya meriahlah,” ujarnya.

### KAMPUNG KB WISATA

Adalah Kampung KB Desa Tanjung, yang diluncurkan dua tahun lalu, menjadi contoh keseriusan pemerintah kabupaten dalam pengembangan potensi wisata. Kampung itu telah dijadikan oleh Pemerintah Kabupaten Sekadau sebagai Kampung KB Wisata.

Pemilihan lokasi Kampung KB Wisata ini oleh BKKBN Kalbar atas persetujuan Bupati Sekadau, Rupinus. Pemilihan ini sebagai bentuk partisipasi atas usaha Pemkab Sekadau dan masyarakat Desa Tanjung yang sudah menentukan wilayahnya sebagai Kampung KB Wisata.

“Jadi lomba itu milik masyarakat sendiri, BKKBN hanya memfasilitasi. Makanya, mereka berduyun-duyun karena lomba itu memang miliknya sendiri,” tutur Kusmana.

Sebagai informasi tambahan, kalau di Sekadau ada Kampung KB Wisata, Forum Antar Umat Beragama Peduli Kependudukan dan Keluarga Sejahtera (Fapsedu) merencanakan membentuk Kampung KB Berwawasan Keagamaan.

“Semoga tahun ini bisa terwujud di tiga kabupaten, yakni Bandung Barat, Jawa Barat; Tangerang Selatan, Banten; dan Kepulauan Seribu, DKI Jakarta,” kata Sekjen Fapsedu Pusat, Freddy Aritonang, belum lama ini.



### BUDAYA TRADISIONAL

Sampan bidar merupakan bagian dari kebudayaan tradisional masyarakat Sekadau, yang dijuluki Bumi Lawang Kuari, salah satu kabupaten di hulu Kalimantan Barat. Kabupaten ini terdiri dari dua kecamatan, yaitu Sekadau Hilir dan Sekadau Hulu.

Sekadau Hilir merupakan pusat kota Sekadau. Bentangan luas Kerajaan Sekadau terlihat jelas dari seberang Sungai Kapuas. Di sisi kota terlintang panjang Sungai Sekadau

juga sebagai wujud untuk meningkatkan silaturahmi bersama masyarakat. Ajang seperti ini juga sebagai wadah untuk membina para atlet, menjaring bibit atlet berbakat untuk mewakili Kabupaten Sekadau pada event lebih tinggi lagi, tambahannya.

### PESONA WISATA ALAM

Obyek wisata di Sekadau bukan hanya di Sungai Sekadau. Wisata alam di pedalaman Kalimantan, termasuk Kalimantan Barat;

jubkan, laksana permata belum diasah. Padahal, jika dikelola disertai dengan upaya promosi yang maksimal maka tempat wisata alam di Sekadau ini dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) maupun warga di sekitar lokasi wisata.

### TAMAN WISATA BATU JATO

Kawasan wisata alam ini berada di Desa Pantok, Kecamatan Nanga Taman. Pemandangan indah juga menemani selama



Masyarakat yang mengikuti lomba dayung dan sejumlah kader KB yang tergabung dalam paduan suara antusias mengikuti pesta rakyat di Kampung KB Desa Tanjung, Kecamatan Sekadau Hilir. (Foto: MPC BKKBN)

yang bermuara di Sungai Kapuas.

"Sungai Sekadau sering di jadikan sebagai *race* lomba sampan bidar yang kerap diselenggarakan oleh Pemkab Sekadau," ujar Aqil, warga Sekadau.

Lomba bidar pertama kali diselenggarakan di Sungai Musi, Palembang (Sumatera Selatan). Panjang sungai 750 km, terpanjang kelima di Indonesia. "Bidar adalah singkatan dari biduk lancar, sejenis perahu yang zaman dulu kala khusus digunakan oleh petugas penghubung (kurir). Masa sekarang bidar dimodifikasi menjadi panjang dan agak melebar, sehingga bisa memuat delapan hingga 15 orang pedayung.

Aqil mengungkapkan sampan bidar kerap diperlombakan di Sekadau, untuk melestarikan peradaban air Sungai Kapuas, sekaligus memanfaatkan lintasan jalur air sungai terpanjang (1.143 km) di Indonesia ini.

Camat Sekadau Hilir, Safii Yanto mengatakan, selain untuk melestarikan budaya, lomba sampan bidar juga untuk menjaring atlet-atlet berbakat. Pengurus Persatuan Olahraga Dayung (PODSI) Sekadau, Supardi mengatakan, lomba sampan bidar dilaksanakan dua kali setahun. Ajang tersebut dilakukan untuk menjaring bibit-bibit atlet dayung.

Asisten III Setda Kabupaten Sekadau, Sapto Utomo mengatakan, pemerintah daerah menyambut baik ajang tersebut, yang

memang memukau. Terlebih bagi orang kota yang dijejali oleh kebanyakan obyek wisata buatan.

Sebut saja Air Terjun Entugun, salah satu destinasi wisata alam terbaik yang dimiliki Indonesia. Letaknya berada di Dusun Kepayang, Desa Tembaga, Kecamatan Nanga Mahap, Kabupaten Sekadau. Tempat wisata alam ini masih lestari dan belum terjamah oleh tangan-tangan serakah.

Kabupaten Sekadau memiliki banyak potensi wisata yang menarik untuk dieksplor. Keindahan alam yang dimilikinya akan mampu menyedot wisatawan mancanegara untuk datang ke sana.

Air Terjun Entugun berbatasan dengan Ketapang, berjarak sekitar 45 kilometer dari pusat kota Sekadau, dapat ditempuh melalui jalur darat menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat.

Air terjun ini mempunyai tiga tingkatan dengan masing-masing tingkatan berketinggian kurang lebih 30 meter. Airnya deras berliku-liku dan batunya terhampar saling memadu antara satu dengan yang lain.

Pepohonan di sekitarnya yang lebat membuat suasana menjadi sejuk dan menyegarkan. Lokasinya yang jauh dari hingar bingar perkotaan, membuatnya sangat cocok dikunjungi untuk melepas rasa lelah dan penat setelah sibuk beraktivitas.

Air Terjun Entugun memang menak-

perjalanan karena bukit dan hutan terbilang asri. Sampai di Kecamatan Nanga Taman, perjalanan masih harus dilanjutkan menuju lokasi wisata berkisar antara 30 menit.

Kawasan wisata Batu Jato menjadi tujuan utama keluarga dalam menghabiskan waktu di akhir pekan, selain biaya yang dikeluarkan tidak terlalu menguras kantong, kawasan wisata alam ini juga memiliki pemandangan atau panorama khas yang masih sangat alami.

Masyarakat pedesaan yang ramah, pemandangan alam berupa bukit yang indah, hutan yang subur dan masih terjaga, serta tentunya air mengalir deras dan hamparan batu besar yang menghiasi lokasi wisata alam Batu Jato tersebut. Semua itu indah dinikmati.

### AIR TERJUN SEMIRAH

Mengunjungi sebuah kawasan wisata air terjun adalah hal yang sangat menyenangkan. Sejuknya embun percikan air terjun yang menyegarkan badan, suara air jatuh yang menenangkan hati, belum lagi sensasi pijat gratis saat mandi di bawah air terjun.

Air Terjun Semirah, begitu masyarakat sekitar menyebutnya. Kawasan wisata air terjun ini terletak di Dusun Belandong, Desa Tinting Boyok, Kecamatan Sekadau Hulu.

Air terjun ini terbagi dalam dua jenis yaitu Semirah Merambang dan Semirah Putih. Semirah sendiri dalam bahasa daerah setempat memiliki arti kata merah. (her/dbs/san)

dr. Irma Ardiana MAPS Menjawab

## Metode Kontrasepsi Tunda Kelahiran Anak Kedua

Yth Dr. Irma

Saat ini saya sedang mengandung anak pertama. Kehamilan saya telah berusia 28 minggu. Saya dan suami telah merencanakan untuk menunda kehamilan anak kedua setelah dua tahun. Metode kontrasepsi apa dan kapan waktu terbaik saya bisa menggunakan pilihan kontrasepsi tersebut.

Mohon penjelasannya.

Ny R, 27 th



Yth Ny R

Selamat atas kehamilan anak pertamanya. Saya sangat bangga Ny. R dan suami telah melakukan perencanaan kehidupan keluarga Ny R. dengan sangat baik. Ny R dapat merencanakan kehamilan pertama, durasi penjarangan antara kehamilan pertama dan kedua serta metode kontrasepsi yang terbaik untuk R dan mungkin suami bisa gunakan.

Pada prinsipnya saya sangat menganjurkan Ny R melakukan persiapan untuk pemberian ASI eksklusif kepada buah hati tersayang. Konsumsi nutrisi yang cukup selama kehamilan dan menyusui yang mengandung zat besi, asam folat, kalsium, vitamin A dan iodin. Pemberian ASI eksklusif dapat berfungsi sebagai metode kontrasepsi modern selama 6 (enam) bulan pertama. Jika pemberian ASI dilakukan tidak secara eksklusif, maka Ny R memiliki potensi untuk hamil kembali setelah 4 sampai dengan 6 minggu pertama setelah melahirkan.

Untuk memilih metode kontrasepsi yang nyaman dan sesuai kelayakan medis Ny R, maka tidak perlu menunggu



sampai siklus menstruasi datang. Untuk penjarangan kehamilan selanjutnya Ny R dapat memilih menggunakan beberapa alternatif metode kontrasepsi, yaitu implan, pil, suntikan atau kondom.

Implan dapat dipasang segera setelah melahirkan, begitu pula pil kontrasepsi. Dipastikan bahwa selama proses menyusui, pil yang dikonsumsi adalah pil yang mengandung hormon progesterin saja. Kontrasepsi suntikan yang hanya mengandung hormon progesterin dapat digunakan pada 6 minggu setelah melahirkan. Jika tidak menyusui maka suntikan ini dapat langsung digunakan. Kondom dapat dijadikan sebagai pilihan dengan perhatian pada pola penggunaan yang harus benar dan konsisten.

Saya anjurkan agar Ny R melakukan kunjungan *antenatal* untuk menerima konseling termasuk mengenai pilihan metode kontrasepsi pasca persalinan dan kunjungan pasca melahirkan untuk kunjungan pelayanan kontrasepsi.

Demikian Ny. R semoga bermafaat.

Salam "jika terencana, semua menjadi lebih mudah"

Terima kasih.

Dr. Irma

Dr. Irma Ardiana menerima pertanyaan pembaca melalui surat ke alamat redaksi atau email [irma\\_ardiana@yahoo.com](mailto:irma_ardiana@yahoo.com)





# Kalimantan Selatan & Pelayanan KB




Awal Juli 2019 mendatang Provinsi Kalimantan Selatan akan menjadi tuan rumah puncak peringatan Hari Keluarga Nasional XXVI Tahun 2019. Pemprov Kalimantan Selatan pun berbenah.

Puncak peringatan Hari Keluarga Nasional yang dikenal sebagai Harganas itu akan berlokasi di Banjarbaru, sebuah kota berjarak 30 menit perjalanan darat dari Banjarmasin, ibukota Kalimantan Selatan.

Ditetapkan sebagai puncak peringatan Harganas, karena Kalimantan Selatan merupakan salah satu wilayah yang serius menggarap program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Lebih khusus lagi Banjarbaru dengan Kampung KB-nya.

Salah satu kegiatan yang mengemuka adalah pelayanan KB. Dilakukan dari ujung ke ujung, agar pemerataan pelayanan terjadi. Potret di bawah ini menggambarkan giatnya program-pelayanan. (sara)





Meski Hati Telah Bertemu,  
Pelaminan Bisa Menunggu.  
Menikahlah Pada Usia Yang Ideal  
Wanita 21 Tahun, Pria 25 Tahun.

Perkawinan perlu kesiapan fisik, mental, dan ekonomi. Pasangan yang menikah di usia ideal cenderung lebih tahan terhadap berbagai masalah yang muncul pada keluarga muda. Jika ingin menjadi pasutri yang memiliki keluarga ideal, menikahlah di usia ideal. Minimal Wanita 21 tahun, Pria 25 tahun.

**Kalau terencana, semua lebih mudah**

DITVOKKOM 2018



[www.bkkbn.go.id](http://www.bkkbn.go.id)

[@bkkbnoofficial](#)